

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**(Studi Kasus : Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Padang
Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Program Studi Ekonomi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Dhivia Prisasti
NPM : 1905180004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DHIVIA PRISASTI
NPM : 1905180004
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS KECAMATAN PADANG HULU DAN KECAMATAN PADANG HILIR).

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.)

Penguji II



(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si.)

Pembimbing



(MUKMIN POHAN, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : DHIVIA PRISASTI
NPM : 1905180004
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : EEMPLASMEN PABATU DUSUN IV
**Judul Skripsi : EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING
TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi



MUKMIN POHAN, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DHIVIA PRISASTI
NPM : 1905180004
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : EEMPLASMEN PABATU DUSUN IV
Judul Skripsi : EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20-7-23	Pendahuluan Bab. I	h	
	Perbaikan mlr 2.	h	
17-7-23	Definisi, batasan konsep dan masalah	h	
19-7-23	Tentang teori	h	
27-7-23	Heil dan Pembahasan	h	
9/8-23	Kerangka dan form	h	
24/8-23	Perbaikan list' saran	h	
7/9-23	Revisi pms file	h	

Pembimbing Skripsi

MUKMIN POHAN, SE., M.Si

Medan, September 2023
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DHIVIA PRISASTI**

NPM : 1905180004

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : **EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



DHIVIA PRISASTI

ABSTRAK

EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA (Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Padang Hilir)

Dhivia Prisasti

1905180004

**Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

E-mail : dhiviaaprisasti@gmail.com

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak sesuai, antara penduduk yang harus dibantu dan yang tidak harus dibantu. Sehingga masih banyak calon anggota PKH yang tidak memenuhi kriteria penerima PKH di Kota Tebing Tinggi dan adanya ketidakmerataan pembagian bantuan sosial (PKH) kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah (1) Melakukan analisa deskriptif secara kuantitatif tentang perkembangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari komponen pendidikan di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi (2) Melakukan evaluasi untuk penerima bantuan PKH komponen pendidikan di Kota Tebing Tinggi tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan rumus Slovan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berasal dari *website-website* resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan penyebaran kusioner melalui *googel form*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 99 responden yaitu 59 orang penerima PKH dan 40 orang pendamping di Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir terdapat 20 KPM menyatakan bahwa dana PKH sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan juga dapat menutupi dana pendidikan

Kata Kunci: Evaluasi, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH YANG TERCANTUM DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA (Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Padang Hilir)

Dhivia Prisasti

1905180004

**Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

E-mail : dhiviaaprisasti@gmail.com

Government policies in tackling poverty do not match between the population who should be helped and those who should not be helped. So that there are still many prospective PKH members who do not meet the criteria for PKH recipients in Tebing Tinggi City and there is an uneven distribution of social assistance (PKH) to the community in Tebing Tinggi City. The objectives of this study are (1) Conducting a quantitative descriptive analysis of the development of Family Hope Program (PKH) assistance from the education component in North Sumatra and Tebing Tinggi City (2) Evaluating the recipients of PKH assistance for the education component in Tebing Tinggi City in 2023. This study used a quantitative descriptive approach. The sampling technique in this study is by using the Slovan formula. The data collection technique used in this study came from official websites such as the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Social Affairs, and the distribution of questionnaires through google forms. The results showed that from 99 respondents, namely 59 PKH recipients and 40 assistants in Padang Hulu and Padang Hilir Districts, there were 20 KPM stating that PKH funds were sufficient to meet school needs and could also cover education funds

Keywords: Evaluation, Poverty, Family Hope Program (PKH)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Yang Tercantum Di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”**.

Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari semua pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan hormat dan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izinnya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta (Bapak Supriono dan Ibu Eka Witati), adik tercinta (Muhammad Firza Ziranda) yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., M.M., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mukmin Pohan S.E., M.Si sebagai Dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu dalam pembuatan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Jurusan Ekonomi Pembangunan yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan.
10. Teman terdekat saya selama dikampus Rahmy dan Sella terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, masukan dan semangat kepada penulis selama ini.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan Stambuk 2019 kelas A Pagi, yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Terima Kasih.

Medan, September 2023
Penulis

Dhivia Prisasti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Akademik	16
1.6.2 Manfaat Non Akademik	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teoritis	18
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	18
2.1.2 Kebijakan Fiskal	26
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Regulasi/Kebijakan Pemerintah	34
2.3.1 Program Keluarga Harapan	34
2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan	35
2.3.3 Kriteria Program Keluarga Harapan	36
2.4 Kerangka Berpikir Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40

3.5	Populasi dan Sampel	40
3.6	Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1	Analisa Ekonomi Secara Deskriptif.....	41
3.6.2	Monitoring dan Evaluasi	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Gambaran Umum Tebing Tinggi	42
4.1.1	Kondisi Geografis Tebing Tinggi.....	42
4.1.2	Kondisi Demografi	43
4.1.3	Kondisi Ekonomi	45
4.1.4	Kondisi Sosial.....	49
4.2	Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian.....	53
4.2.1	Perkembangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Komponen Pendidikan di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi	53
4.2.2	Evaluasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tahun 2023	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Sumatera Utara.....	3
Tabel 1. 2 Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik.....	6
Tabel 1. 3 Komponen Program Keluarga Harapan.....	11
Tabel 1. 4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020.....	12
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4. 1 Luas Kecamatan Kota Tebing tinggi.....	43
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kecamatan Tahun 2016,2018.....	44
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja tahun 2020-2021.....	44
Tabel 4. 4 Jumlah Nilai Produk Domestic Regional Bruto ADHK menurut lapangan usaha di Kota tebing Tinggi tahun 2017-2022.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.....	21
Gambar 2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman.....	23
Gambar 2. 3 Kurva Wagner,Solow, dan Musgrave.....	24
Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian.....	38
Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	63
Gambar 4. 2 Pendidikan Terakhir Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	64
Gambar 4. 3 Mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melalui orang lain	67
Gambar 4. 4 Penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta Program Keluarga harapan (PKH) komponen pendidikan.....	68
Gambar 4. 5 Menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan secara langsung melalui ATM.....	69
Gambar 4. 6 Proses pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan tepat pada waktu yang telah ditentukan (4 kali dalam 1 tahun.....	70
Gambar 4. 7 Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan benar-benar berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta Program keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan.....	71
Gambar 4. 8 Bantuan dana yang diberikan dapat meningkatkan kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	72
Gambar 4. 9 Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat menutupi dana pendidikan.....	73
Gambar 4. 10 Memahami hak apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan.....	74
Gambar 4. 11 Memahami kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	75

Gambar 4. 12 Tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap pendidikan berhasil dilakukan.....	76
Gambar 4. 13 Menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan kurang lebih 5 tahun.....	79
Gambar 4. 14 Pendamping menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara langsung dan membagikannya dengan anggota.....	80
Gambar 4. 15 Para pendamping aktif melakukan pertemuan dengan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	81
Gambar 4. 16 Para pendamping selalu bersedia mendengar aduan dari para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan dan memberikan pengarahan	81
Gambar 4. 17 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik	82
Gambar 4. 18 Pendamping memperlakukan seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara sama.....	83
Gambar 4. 19 Pendamping memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan.....	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Nilai Produk Domestic Regional Bruto per kapita ADHK di Kota Tebing Tinggi 2020-2022.....	47
Grafik 4. 2 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2018-2021	48
Grafik 4. 3 Persentase Gini Ratio di Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022.....	49
Grafik 4. 4 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.....	50
Grafik 4. 5 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) di Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022	51
Grafik 4. 6 Persentase IPM di Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022	52
Grafik 4. 7 Rata-rata lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun di Kota tebing Tinggi tahun 2020-2022.....	53
Grafik 4. 8 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.....	55
Grafik 4. 9 Jumlah Anggaran (rupiah) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.....	56
Grafik 4. 10 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu Tahun 2022	59
Grafik 4. 11 Jumlah Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022.....	60
Grafik 4. 12 Usia Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	62
Grafik 4. 13 Pekerjaan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	65
Grafik 4. 14 Pendapatan/bulan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu	66

Grafik 4. 15 Usia Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	77
Grafik 4. 16 Jenis Kelamin Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	78
Grafik 4. 17 Pendidikan Terakhir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di Dunia. Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sedikit yang memenuhi keberhasilan.

Kemiskinan pada Negara berkembang dianggap dalam permasalahan pembangunan yang tidak merata sehingga melebarnya kesenjangan sosial yang ada dalam suatu negara dan juga berpengaruh pada kesenjangan pendapatan antar daerah. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karenanya meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan, tapi hingga kini faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih layak dengan standar kehidupan yang berlaku disekitarnya atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang. Banyak sekali penduduk Indonesia saat ini yang masih hidup 2 dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miskin, yang membuat mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya.

Menurut (Todaro, 2004) kemiskinan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi dimana masyarakat miskin tidak dapat membiayai pendidikan anaknya, ketiadaan peluang dalam investasi menyebabkan pertumbuhan perkapita lebih kecil. Peningkatan pendapatan penduduk miskin menyebabkan kenaikan jumlah permintaan produk kebutuhan rumah tangga sehingga produksi lebih besar, kesempatan kerja lebih meningkat, dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi juga cepat. Selain itu, pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk dapat dilihat dari kesehatan, gizi, rendahnya pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Persoalan kemiskinan di picu oleh kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran. Selain itu, banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model ini, menempati bagian yang cukup besar dalam kalangan masyarakat

Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun mereka dalam status sedang bekerja.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Sumatera Utara

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	872.61	839.49	819.44	814.91	834.24
Sumatera Utara	1453.87	1324.98	1282.04	1283.29	1343.86
Sumatera Barat	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67
Riau	514,62	500,44	490,72	483,39	500,81
Jambi	286,55	281,69	274,32	277,8	293,86
Sumatera Selatan	1086,92	1068,27	1073,74	1081,58	1113,76
Bengkulu	316,98	301,81	302,58	302,58	306
Lampung	1131,73	1097,05	1063,66	1049,32	1083,93
Kep. Bangka Belitung	74,09	76,26	68,38	68,39	72,71
Kep. Riau	125,37	131,68	128,46	131,97	144,46
DKI Jakarta	389,69	373,12	365,55	480,86	501,92
Jawa Barat	4168,44	3615,79	3399,16	3920,23	4195,34
Jawa Tengah	4450,72	3897,2	3743,23	3980,9	4109,75
Di Yogyakarta	488,53	460,1	448,47	475,72	506,45
Jawa Timur	4617,01	4332,59	4112,25	4419,1	4572,73
Banten	675,04	661,36	654,46	775,99	867,23
Bali	180,13	171,76	163,85	165,19	201,97
Nusa Tenggara Barat	793,78	737,46	735,96	713,89	746,66
Nusa Tenggara Timur	1150,79	1142,17	1146,32	1153,76	1169,31
Kalimantan Barat	387,43	387,08	378,41	366,77	367,89
Kalimantan Tengah	139,16	136,93	134,59	132,94	140,04
Kalimantan Selatan	193,92	189,03	192,48	187,87	208,11
Kalimantan Timur	220,17	218,9	219,92	230,26	241,77
Kalimantan Utara	49,47	50,35	48,78	51,79	52,86
Sulawesi Utara	198,88	193,31	191,7	192,37	196,35
Sulawesi Tengah	417,87	420,21	410,36	398,73	404,44
Sulawesi Selatan	813,07	792,63	767,8	776,83	784,98
Sulawesi Tenggara	331,71	307,1	302,58	301,82	318,29
Gorontalo	205,37	198,51	186,03	185,02	186,29
Sulawesi Barat	149,76	151,78	151,4	152,02	157,19
Maluku	320,51	320,08	317,69	318,18	321,81
Maluku Utara	76,47	81,46	84,6	86,37	87,16
Papua Barat	228,38	214,47	211,5	208,58	219,07
Papua	897,69	917,63	926,36	911,37	920,44
Indonesia	27771,22	25949,8	25144,72	26424,02	27542,77

Sumber: bps.go.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 di Indonesia tercatat sebesar 27.771.220 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1.827.322 jiwa menjadi 25.949.800 jiwa. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 805.080 jiwa menjadi 25.144.720 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 26.424.020 jiwa. Dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 27.542.770 jiwa. Peningkatan penduduk miskin ada tahun 2020 dan 2021 disebabkan adanya dampak dari masa pandemic Covid-19 yang banyak menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan banyak usaha yang tutup.

Pada Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk miskin di tahun 2017 tercatat 4.168.440 jiwa. Mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3.615.790 jiwa penduduk miskin. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 3.399.160 jiwa. Pada tahun 2020 penduduk miskin meningkat menjadi 3.920.230 jiwa. Dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 4.295.340 jiwa penduduk miskin. Pada Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk miskin di tahun 2017 tercatat 4.450.720 jiwa. Mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3.897.200 jiwa penduduk miskin. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 3.743.230 jiwa. Pada tahun 2020 penduduk miskin meningkat menjadi 3.980.900 jiwa. Dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 4.109.750 jiwa penduduk miskin. Pada Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskin di tahun 2017 tercatat 4.617.010 jiwa. Mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4.332.590 jiwa penduduk miskin. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 4.112.250 jiwa. Pada tahun 2020 penduduk miskin meningkat menjadi 4.419.100 jiwa. Dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 4.572.730 jiwa penduduk

miskin. Banyak faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan pulau lain, salah satu faktor utamanya adalah pulau Jawa memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain dan Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan.

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat 1.453.870 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 1.324.980 jiwa. Mengalami penurunan sebesar 128.890 jiwa. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 1.282.040 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.283.290 jiwa. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 1.343.860 jiwa.

Tabel 1. 2 Data Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi, 2018-2021

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (rupiah/kapita/bulan)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribu)	PERSENTASI PENDUDUK MISKIN
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	426 469	16.64	10.27
2019	460 533	16.30	9.94
2020	493 227	16.32	9.85
2021	536 531	17.37	10.30

Sumber: BPS Tebing Tinggi, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Dapat dilihat dari data diatas bahwa garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan presentasi penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terlihat jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi sebesar 16,64 ribu jiwa dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 17,37 ribu

jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi maka akan memiliki beberapa dampak negatif seperti meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, munculnya masalah kesehatan di masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, meningkatnya angka kematian, dan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan kultural terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyediakan sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan struktur sosial dalam masyarakat (Susanto, 2006).

Menurut UNDP (1995) untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Kondisi ini ternyata belum sepenuhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, misalnya masih terjadi permasalahan kemiskinan yang berkaitan erat dengan dunia kesehatan dan pendidikan yang tercermin melalui lingkaran perangkap kemiskinan. Rendahnya penghasilan keluarga menyebabkan keluarga tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan bahkan tingkat minimum sekalipun. (Depsos, 2008)

Tabel 1. 3 Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² /orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/ bambu/ kayu murahan/ semen kualitas rendah
3	Jenis dinding tempat tinggal	Bambu/ rumbia/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya/ bersama
5	Sumber penerangan utama	Bukan listrik
6	Bahan bakar untuk masak	Kayu bakar/ arang
7	Konsumsi daging/ susu/ ayam perminggu	Tidak pernah mengkonsumsi/ hanya satu kali dalam seminggu
8	Sumber air minum	Sumur/ mata air/ tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
9	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli/ hanya membeli satu stel dalam setahun
10	Frekuensi makan dalam sehari untuk anggota rumah tangga	Kurang dari dua kali dalam sehari
11	Lapangan pekerjaan anggota rumah tangga	Petani dengan luas lahan setengah hectare/ buruh tani/ kuli bangunan/ tukang becak/ pemulung/ pekerja informal lainnya dengan pendapatan Rp. 600.000,00 per bulan
12	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/ hanya sampai jenjang SD dan tidak lebih
13	Kepemilikan asset/ barang berharga minimal Rp. 500.000,00	Tidak ada
14	Kemampuan berobat ke puskesmas/ poliklinik	Tidak mampu

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).go.id

Kategori atau Kriteria miskin menurut Kementerian Sosial Nomor 146/HUK/2013 : Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a, yang berasal dari Rumah tangga memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat ijik/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangun tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m^2 /orang, dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Utamanya saat pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatkan angka kemiskinan. Pandemi COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada bulan Maret 2020. Keadaan ini memaksa seluruh dunia termasuk Indonesia untuk menanggulangi dampak yang lebih parah terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan kesehatan. Banyaknya sektor ekonomi yang terdampak dan juga banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Merespon dari meningkatnya angka kemiskinan yang tinggi utamanya saat pandemi ini pemerintah memberikan berbagai bantuan yang diberikan secara tunai maupun non tunai.

Untuk meminimalisasikan permasalahan kemiskinan, kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial meningkatkan efektivitas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jamninan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian pemerintah dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) bersyarat kepada keluarga pra-sejahtera dan rentan yang mana terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau KPM (Kementerian Sosial 2020). Program ini diharapkan berkesinambungan dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Program Keluarga

Harapan ada lima komponen MDGs yang sangat potensial dapat dicapai yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.

Dengan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan berdampak pada tingkat kematian bayi. Angka kematian ibu di Indonesia juga tinggi. Tingginya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, fasilitas kesehatan yang tersedia saat dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kerja kesehatan tradisional dari tenaga medis lainnya. Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan terperangka dalam siklus kesehatan yang buruk.

Dari segi pendidikan, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah adalah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa

pendidikannya sudah cukup dan alasan lainnya. Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak masyarakat miskin. Menurut data BPS masih banyak usia sekolah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada diluar sistem persekolahan harus ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam sistem persekolahan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan) dan dana PKH dicairkan sebanyak empat kali dalam setahun.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Dalam program PKH ada 3(tiga) komponen penerima bantuan, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, didalam komponen kesejahteraan sosial terdapat beberapa klasifikasi diantaranya adalah disabilitas berat, disabilitas ringan serta lansia. Kewajiban peserta PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbangan badan anak balita dan anak prasekolah. Kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. (Kemensos)

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memiliki akses yang lebih baik untuk

memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Dalam jangka pendek dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan model manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus tujuan PKH adalah (1) meningkatkan konsumsi keluarga penerima PKH, (2) meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH, (3) meningkatkan taraf pendidikan anak peserta PKH, (4) mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial, (5) memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial. (Kemensos)

Tabel 1. 4 Komponen Program Keluarga Harapan

Komponen Kesehatan	Komponen Pendidikan	Komponen Kesejahteraan Sosial
Ibu hamil/nifas	SD	Disabilitas Berat
Anak usia dibawah 6 tahun	SMP	Lansia Usia 70 tahun keatas
-	SMA	-

Sumber: Kementrian Sosial

Setiap penerima PKH diberikan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan. Adapun hak peserta PKH adalah mendapatkan bantuan tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program, mendapatkan layanan fasilitas kesehatan,

pendidikan, kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya, terdaftar dan mendapatkan program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya. (Kemensos)

Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) yang berhak mendapatkan bantuan uang tunai dari Kemensos tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Ibu Hamil/Nifas Rp. 3.000.000 per tahun
2. Anak Usia Dibawah 6 tahun Rp. 2.400.000 per tahun
3. Anak SD Rp. 900.000 per tahun
4. Anak SMP Rp. 1.500.000 per tahun
5. Anak SMA Rp. 2.000.000 per tahun
6. Lansia Rp. 2.400.000 per tahun
7. Penyandang Disabilitas Rp. 2.400.000 per tahun

Program ini juga merupakan program kolaborasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. (Depsos, 2008)

Tabel 1. 5 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Kabupaten				
Nias	15 755	17 384	3 151 000 000	3 476 800 000
Mandailing Natal	26 348	25 745	5 269 600 000	5 149 000 000
Tapanuli Selatan	17 426	17 957	3 485 200 000	3 591 400 000

Tapanuli Tengah	24 323	26 696	4 864 600 000	5 339 200 000
Tapanuli Utara	16 560	20 547	3 312 000 000	4 109 400 000
Toba	12 001	11 939	2 400 200 000	2 387 800 000
Labuhan Batu	21 745	21 456	4 349 000 000	4 291 200 000
Asahan	38 919	38 509	7 783 800 000	7 701 800 000
Simalungun	46 862	44 023	9 372 400 000	8 804 600 000
Dairi	17 154	17 234	3 430 800 000	3 446 800 000
Karo	16 385	18 426	3 277 000 000	3 685 200 000
Deli Serdang	69 541	67 505	13 908 200 000	13 501 000 000
Langkat	68 316	75 874	13 663 200 000	15 174 800 000
Nias Selatan	26 097	24 988	5 219 400 000	4 997 600 000
Humbang Hasundutan	14 461	14 359	2 892 200 000	2 871 800 000
Pakpak Bharata	3 058	3 137	611 600 000	627 400 000
Samosir	7 819	7 944	1 563 800 000	1 588 800 000
Serdang Bedagai	31 615	33 074	6 323 000 000	6 614 800 000
Batubara	32 377	35 845	6 475 400 000	7 169 000 000
Padang Lawas Utara	10 126	10 243	2 025 200 000	2 048 600 000
Padanglawas	11 527	13 301	2 305 400 000	2 660 200 000
Labuhanbatu Selatan	9 885	10 423	1 977 000 000	2 084 600 000
Labuhanbatu Utara	20 965	20 804	4 193 000 000	4 160 800 000
Nias Utara	19 018	18 259	3 803 600 000	3 651 800 000
Nias Barat	10 444	11 525	2 088 800 000	2 305 000 000
Kota				
Sibolga	5 184	4 750	1 036 800 000	950 000 000

Tanjung Balai	19 035	16 451	3 807 000 000	3 290 200 000
Pematang Siantar	14 543	15 236	2 908 600 000	3 047 200 000
Tebing Tinggi	10 760	10 244	2 152 000 000	2 048 800 000
Medan	88 539	79742	17 707 800 000	15 948 400 000
Binjai	12 063	14 452	2 412 600 000	2 890 400 000
Padangsidempuan	8 859	8 369	1 771 800 000	1 673 800 000
Gunung Sitoli	14 292	12 901	2 858 400 000	2 580 200 000
Sumatera Utara	762 002	769 342	152 400 400 000	153 868 400 000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Utara mulai diberlakukan pada tahun 2008 yang meliputi 3 Kabupaten/kota yakni Medan, Nias dan Tapanuli Tengah sebagai daerah percontohan. Sumatera Utara dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) mengingat jumlah penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak.

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kota di Sumatera Utara yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penduduk miskin kota Tebing Tinggi tahun 2020 tercatat 16.320 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 17.370 jiwa. Mengalami kenaikan sebesar 1.050 jiwa. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16.340 jiwa. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 3.843,8 Ha dan memiliki 5 Kecamatan (Bajenis, Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan, dan Tebing Tinggi Kota) dengan 27 kelurahan. Pada tahun 2019, penduduknya mencapai 164.402 jiwa serta kepadatan rata-rata 4,28 ribu jiwa/Km². Penduduknya pada umumnya bekerja di sektor perdagangan, angkutan, jasa, industri, pertanian, konstruksi, pertambangan, galian, keuangan, pegawai negeri

dan ABRI. Adapun jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 mencapai 66,72 %. Pada tahun 2020 Dinas Sosial Tebing Tinggi menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 8.629 Keluarga Penerima Manfaat.

Meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, faktanya masih saja ada beberapa kepala keluarga yang tidak menerima bantuan PKH. Dan masih saja ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan PKH. Pembagian bantuan PKH juga masih belum merata. Akan tetapi diharapkan dengan adanya PKH ini dapat meningkatkan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Yang Tercantum Di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak sesuai, antara penduduk yang harus dibantu dan yang tidak harus dibantu.
2. Masih banyak calon anggota PKH yang tidak memenuhi kriteria penerima PKH di Kota Tebing Tinggi.
3. Ketidakmerataan pembagian bantuan sosial (PKH) kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah penggunaan dana pemerintah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari komponen pendidikan yang tercantum di DTKS pada Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi?
2. Bagaimana evaluasi penerima PKH komponen pendidikan di Kota Tebing Tinggi tahun 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa deskriptif secara kuantitatif tentang perkembangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi.
2. Melakukan evaluasi untuk penerima bantuan PKH komponen pendidikan di Kota Tebing Tinggi tahun 2023.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Akademik

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi penelitian untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.

2. Bagi Staff Pengajar

Mengembangkan dan menerapkan penelitian ini untuk jurnal dibidang akademik.

3. Bagi Peneliti

- a. Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- b. Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

1.6.2 Manfaat Non Akademik

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan program kebijakan khususnya mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.

b. Bagi Masyarakat

Agar dapat menumbuhkan rasa sadar masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan mikro (Mangkoesobroto, 1994).

1. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya biaya pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 1987). Dalam teori ekonomi makro, menurut Boediono (1999) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan memcatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya; pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada golongan masyarakat, pembayaran pension, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. (Boediono,1999).

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap - tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadi perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. (Dumairy,1997)

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan ini investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena itu peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public dalam jumlah yang lebih banyak.

Musgrave dalam Norista (2010) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat

ekonomi lebih lanjut Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari dan pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, reaksi, kebudayaan, dan sebagainya. (Mangkoesoebroto, 1993).

Berkaitan dengan hukum Wagner dapat dilihat dari beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

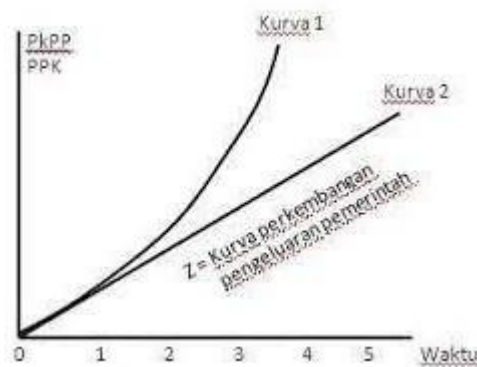
$$\frac{PPkP}{PPK_1} < \frac{PkPPn}{PkPPn} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Dimana :

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2 . . . n : Jangka waktu (tahun)



Sumber: Mangkoesebroto 1993

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

Kurva diatas menunjukkan secara relative peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. (Mangkoesebroto, 1994)

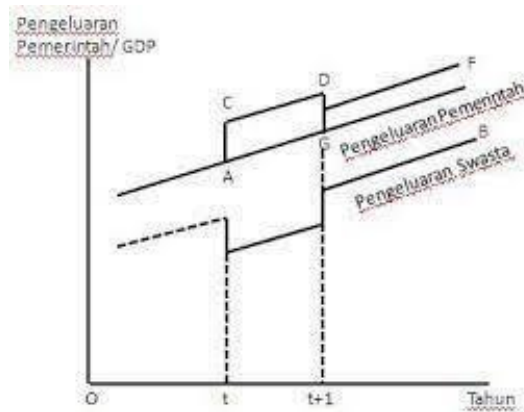
Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin kecil.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pe

merintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek pergantian (*displacement effect*) yaitu ada gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan ini tidak hanya cukup membiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akan lebih lanjut adalah pajak tidak akan menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kehilangan setelah terjadinya perang yang yang disebut efek inpeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh pihak swasta. Efek inilah yang disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat pajak sebelum perang.

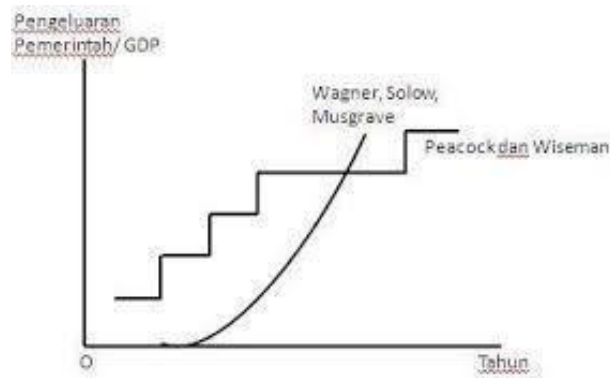


Sumber: Mangkoesoebroto, 2001

Gambar 2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Sumber: Mangkoesebroto, 2001

Gambar 2. 3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan barang lain. (Basri, 2005)

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Penentuan permintaan

$$U^i = f(X, G)$$

Dimana: G = vector dari barang publik

X = vector barang swasta

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat di tolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. (Basri, 2005)

b. Penentuan tingkat output

$$U_P = g(X, G, S)$$

Dimana: U_P = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi

G = vector barang publik

X = vector barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :

$$\text{Max } U_i = F(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :

$$P_x X + t B < M_i$$

Dimana : P = vector harga barang swasta

X = vector barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tariff pajak

2.1.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu Negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah Negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro Negara.

Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran Negara tetap stabil sehingga perekonomian Negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang-piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1904. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997-2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1994, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian Negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

A. Tujuan Kebijakan Fiskal

1. Menjaga dan mengamankan perekonomian Negara

Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi Negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Negara dan memperbaiki masalah didalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

2. Meningkatkan kualitas SDM

Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Menjaga stabilitas harga barang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang didalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya *demand* sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab.

4. Mendorong investasi

Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga Negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

B. Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan incidental.

a. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya.

b. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana

Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran Negara. Fungsi kebijakan fiskal ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemic dan krisis ekonomi. contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan dimasa pandemic dan relaksasi pajak usaha.

c. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental

Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.

2. Dari Segi Penerapan

Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan serta meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Jenis kebijakan dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

3. Dari Segi Neraca Pembayaran

Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal seimbang adalah untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran Negara. Fungsi kebijakan fiskal ini adalah agar Negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua Negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat Negara membutuhkan.

C. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro Negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya :

1. Pajak

Point pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestic dari luar negeri. Demi mencaai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca

pembayaran Negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga Negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.

4. Alokasi Anggaran

Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemic, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Sonia Haryati, Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelan (2018)	PKH, Kesejahteraan masyarakat	Deskriptif kualitatif	Program Keluarga Harapan (PKH) baru mampu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan pesertanya. Sedangkan dari ekonomi belummampu menekan/mengentaskan tingkat kemiskinan di Kelurahan Terjun ini, partisipasi pendidikan dan kesehatan inilah yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.
2	Slamet Agus Purwanto, Sumartono, M. Makmur, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) (2013)	PKH, Penduduk miskin dan pengangguran	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik.
3	Septian Cahya Azhari, Erni Mulyanie, Septian Indri Saputri, Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Program Keluarga Harapan (PKH) Dan BPNT Melalui Program Pejuang Muda di kecamatan	PKH, BPNT, Verifikasi dan validasi	Kualitatif	Program pejuang muda adalah rogram social untuk mengetaskan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu goals program ini adalah mewujudkan wirausaha social/social entrepreneur dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan

	Banjaranyar Kabupaten Ciamis (2022)			objeknya. Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi tahap pertama program pejuang muda ini, proses verifikasi dan validasi ini akan menjadi data yang akan digunakan sebagai pengambilan kebijakan Kementerian Sosial kedepannya untuk mengembangkan program bantuan sosial kepada masyarakat
4	Noni Noerkaisar, Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia (2021)	PKH, BLT, BST, Kartu prakerja, Kartu sembako, Subsidi listrik	Kualitatif	Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sampai dengan saat ini belum berjalan efektif. Masih terdapat permasalahan yang ditemui hampir diseluruh lini JPS baik dari hulu hingga ke hilir. Dari hulu, persoalan yang timbul terkait validitas data penerima bansos. Sedangkan dari hilir ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata, proses distribusi yang memerlukan waktu lama untuk sampai kepada penerima manfaat, penyelewengan dana, pungutan liar serta adanya pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, inclusion dan exclusion error disebabkan pendataan

				yang tidak diperbaharui, hingga politisasi.
5	Rr. Diana Febrianti, Pemanfaatan Bantuan PKH Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo	PKH, Masyarakat	Deskriptif kualitatif	Banyak ditemui penyalahgunaan yang masih tidak semestinya didalam pelaksanaan pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan seperti pembelian bahan pokok dan penggunaan dana triwulan untuk membeli kebutuhan tersier seperti handphone hingga perhiasan. Permasalahan ini ditemui juga karena tidak ada pertanggungjawaban setelah penerima bantuan mencairkan dana bantuan.

2.3 Regulasi/Kebijakan Pemerintah

2.3.1 Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, salah satu kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan dapat merubah pola perilaku keluarga miskin menjadi lebih mandiri dengan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk peningkatan taraf kehidupan menjadi lebih baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan (fasdik) yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, PKH diarahkan agar penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan ekonomi (*gini ratio*), serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. (Kemensos)

Tujuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2 adalah :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.3.3 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

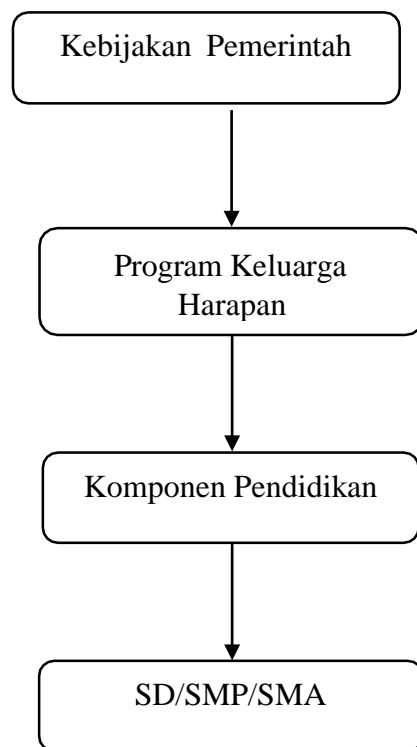
Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 adalah :

1. Kriteria Komponen Kesehatan
 - a. Ibu hamil/menyusui, dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria Komponen Pendidikan
 - a. Anak Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
 - b. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
 - c. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah atau sederajat, dan

- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas tahun).
3. Kriteria Kesejahteraan Sosial
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun), dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penggunaan DTKS adalah UU No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Keberadaan DTKS digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam memberikan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Agar masyarakat miskin dan rentan dapat terdaftar dalam DTKS adalah masyarakat (fakir miskin dan rentan) harus mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

2.4 Kerangka Berpikir Konseptual



Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. (Arikunto, 2006)

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

b. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan data yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
2. Data Primer, yaitu dari hasil observasi dan wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Data sekunder, yang didapatkan dari website BPS yang diperlukan untuk melihat data jumlah penduduk miskin. Serta data yang akurat mengenai hal-hal yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Kota Tebing Tinggi.
2. Data Primer, yang diperoleh dari observasi dan wawancara rumah tangga yang masuk kategori miskin.

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Rumah Tangga yang menerima program PKH klasifikasi pendidikan di Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

b. Sampel

Maka dalam hal penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

N : Jumlah populasi

n : Jumlah sampel

e : person kelonggaran ketidaktelitian Karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 10%.

Persentase kelonggaran ketidaktelitian menggunakan 10% karena dari hasil sampel yang didapatkan dianggap sudah mewakili populasi.

Maka besarnya sampel adalah:

$$n = \frac{10.069}{1 + 10.069 \times 10\%^2}$$

$$n = \frac{10.069}{100,7}$$

$$n = 99 \text{ sampel}$$

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisa Ekonomi Secara Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk table, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi.

3.6.2 Monitoring dan Evaluasi

Memonitoring dan mengevaluasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dengan pertanyaan sesuai syarat dari kementerian sosial.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tebing Tinggi

4.1.1 Kondisi Geografis Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 78 kilometer dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi terletak pada $3^{\circ}19'00''$ - $3^{\circ}21'00''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}11'$ - $98^{\circ}21'$ Bujur Timur. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas wilayah Utara berbatasan dengan PTPN III Rambutan, wilayah Timur berbatasan dengan PT. Socfindo Kebun Tanah Besih, wilayah Selatan berbatasan dengan PTPN III Kebun Pabatu dan wilayah Barat berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela Bandar Bejambu.

Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah 38,438 km². Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11,441 km² atau 29,76 persen dari luas Kota Tebing Tinggi. Sebagian besar (45,55 persen) lahan di Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian. Kota Tebing Tinggi terletak di dataran rendah Pulau Sumatera dengan ketinggian 18-34 m di atas permukaan laut.

Tabel 4. 1 Luas Kecamatan Kota Tebing tinggi

Kecamatan	Luas Wilayah	
	Km2	%
1. Padang Hulu	8,511	22,14
2. Tebing Tinggi Kota	3,473	9,04
3. Rambutan	5,935	15,44
4. Bajenis	9,078	23,62
5. Padang Hilir	11,441	29,76
Tebing Tinggi	38,438	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi memiliki 5 Kecamatan dimana Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 11.441 km² kemudian disusul dengan Kecamatan Padang Hulu dengan luas wilayah mencapai 8,511 km² dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 3.473 km².

4.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2018 mengalami peningkatan dimana dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 160686 jiwa meningkat menjadi 162581 jiwa pada tahun 2017. Berikut ini adalah jumlah penduduk di Tebing Tinggi berdasarkan Kecamatan pada tahun 2016-2018.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2018

KECAMATAN	2016	2017	2018
PADANG HULU	29482.00	29846.00	30232.00
TEBING TINGGI KOTA	25072.00	25196.00	25326.00
RAMBUTAN	34934.00	35406.00	35909.00
BAJENIS	36513.00	36965.00	37446.00
PADANG HILIR	32901.00	33273.00	33668.00
TEBING TINGGI	158902.00	160686.00	162581.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Dapat dilihat dari tabel 4.2 kenaikan jumlah penduduk di Tebing Tinggi dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Bajenis dengan jumlah 36.513 jiwa dan penduduk terendah berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 25.326 jiwa.

B. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berikut dibawah ini adalah jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja tahun 2020-2021:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja tahun 2020-2021

KEGIATAN UTAMA	JUMLAH
- TAHUN 2020	
I. Angkatan Kerja	87.334
1. Bekerja	78.615
2. Pengangguran terbuka	8.719
II. Bukan Angkatan Kerja	38.746
1. Sekolah	9.040
2. Mengurus Rumah Tangga	22.889
3. Lainnya	6.817
Jumlah	126.080
- TAHUN 2021	

I. Angkatan Kerja	86.065
1. Bekerja	78.861
2. Pengangguran terbuka	7.204
II. Bukan Angkatan Kerja	42.036
1. Sekolah	7.599
2. Mengurus Rumah Tangga	27.225
3. Lainnya	7.212
Jumlah	128.101

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SARKERNAS)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penduduk yang bekerja di Kota tebing Tinggi pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angkatan kerja yang bekerja terdapat sebanyak 78.861 jiwa dan yang pengangguran sebanyak 7.204 jiwa sedangkan yang bersekolah sebanyak 7.599 jiwa dan yang mengurus rumah tangga sebanyak 27.225 jiwa.

Tabel 4.4 Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha di Kota Tebing Tinggi

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian	5,849	5,342	5,110
Industri/Manufaktur	9,149	14,071	14,263
Jasa-jasa	48,003	66,692	55,251
Jumlah	63,001	86,105	74,624

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Mayoritas pekerja di Kota Tebing Tinggi bekerja di sektor jasa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 66.692 pekerja yang sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 48.003 pekerja. Sedangkan sektor Manufaktur terjadi peningkatan jumlah pekerja pada tahun 2018 menjadi 14,263 pekerja yang sebelumnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 9.149 pekerja. Sementara untuk sektor pertanian juga mengalami penurunan dari 5.849 pekerja pada tahun 2016 menjadi 5,110 pekerja pada tahun 2018.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Berikut jumlah nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kota tebing Tinggi tahun 2017-2022.

Tabel 4. 5 Jumlah Nilai Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut lapangan usaha di Kota tebing Tinggi tahun 2017-2022

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	56.81	57.13	59.33
Pertambangan dan Penggalian	6.65	6.89	7.14

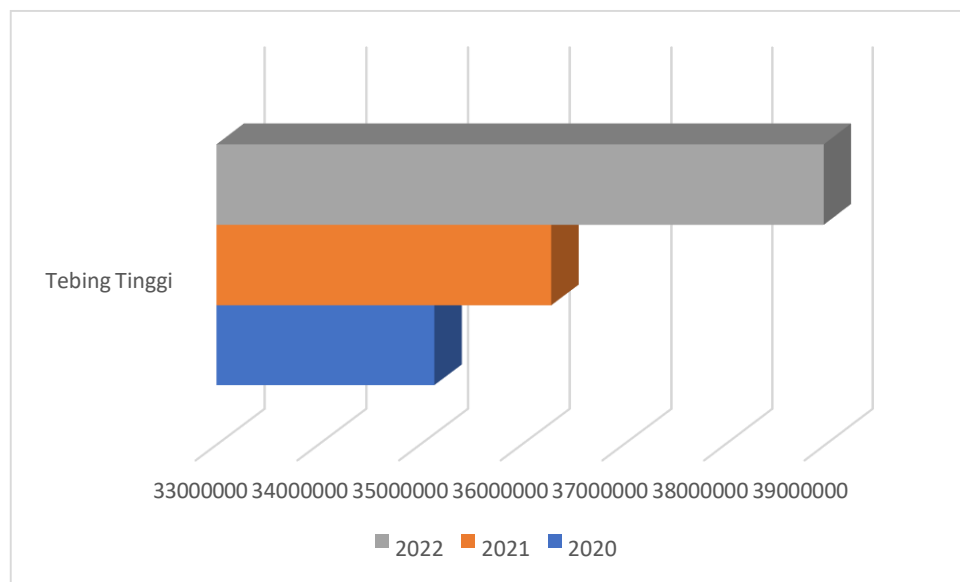
Industri Pengolahan	492.19	500.45	506.61
Pengadaan Listrik dan Gas	7.88	8.18	8.55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.34	9.40	9.72
Konstruksi	561.39	585.59	598.49
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930.67	967.98	1007.66
Transportasi dan Pergudangan	314.97	317.77	347.42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176.37	176.03	190.15
Informasi dan Komunikasi	111.61	118.94	130.06
Jasa Keuangan dan Asuransi	187.70	198.61	206.88
Real Estate	322.81	323.90	339.06
Jasa Perusahaan	16.74	16.77	17.76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397.65	398.56	398.91
Jasa Pendidikan	245.91	250.91	263.25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48.17	47.40	51.62
Jasa Lainnya	39.54	40.26	43.69
PDRB	3926.39	4024.78	4186.31

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB ADHK berdasarkan lapangan usaha di Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022 pdrb meningkat sebesar 4186.31 milyar rupiah. Tiga sektor yang berkontribusi besar pada pembentukan Produk Domestik regional Bruto Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi atas harga konstan yaitu sebesar 1.007,66 milyar rupiah. Kemudian, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 598,49 milyar rupiah dan sektor Industri Pengolahan sebesar 506,61 milyar rupiah.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Berikut nilai Produk Domestic Regional Bruto per kapita ADHK di Kota Tebing Tinggi 2020-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Grafik 4. 1 Nilai Produk Domestic Regional Bruto per kapita ADHK di Kota Tebing Tinggi 2020-2022

PDRB per kapita yang ada di Kota Tebing Tinggi tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2020 dimana pada tahun 2022 meningkat sebesar 38.986.791,51 Milyar rupiah. Dengan meningkatnya PDRB per kapita yang ada di Kota Tebing Tinggi maka adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di suatu Kota tersebut serta semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020 sebesar -4,66% mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,84%. Berikut laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Grafik 4. 2 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2018-2021

Dapat dilihat dari 4 tahun kebelakang pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 hal itu dikarenakan adanya imbas dari pandemic Covid-19 pada saat itu sehingga besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pengeluaran rutin lebih besar dari pada pengeluaran untuk pengeluaran pemerintah.

D. Gini Ratio

Gini Ratio adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Berikut ini gini ratio yang ada di Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Grafik 4. 3 Persentase Gini Ratio di Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022

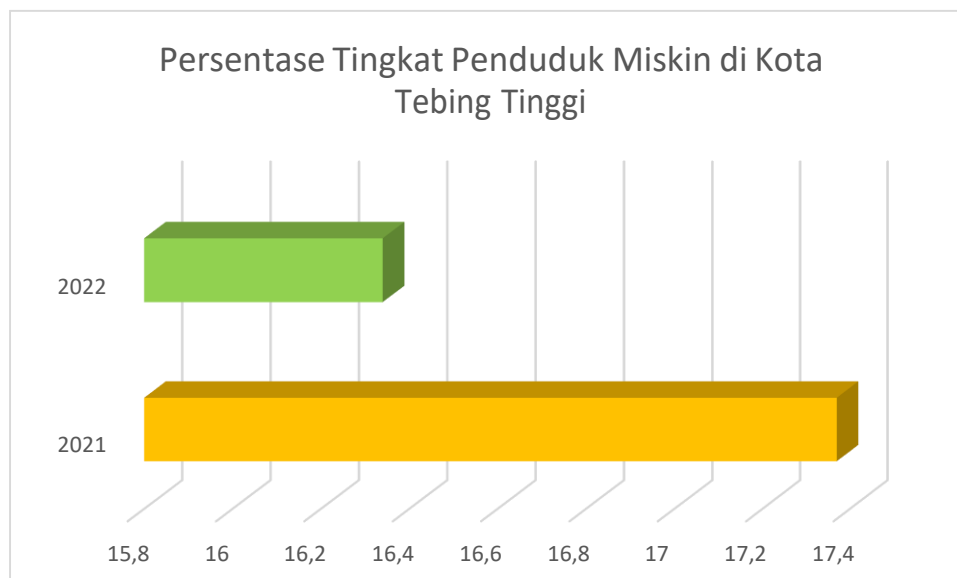
Pada tahun 2022 (tingkat ketimpangan penduduk yang diukur dengan) gini ratio pada Kota Tebing Tinggi dengan nilai 0,334% dan yang tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,344%.

4.1.4 Kondisi Sosial

A. Kemiskinan

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Berikut persentase tingkat kemiskinan menurut yang ada di Kota Tebing Tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

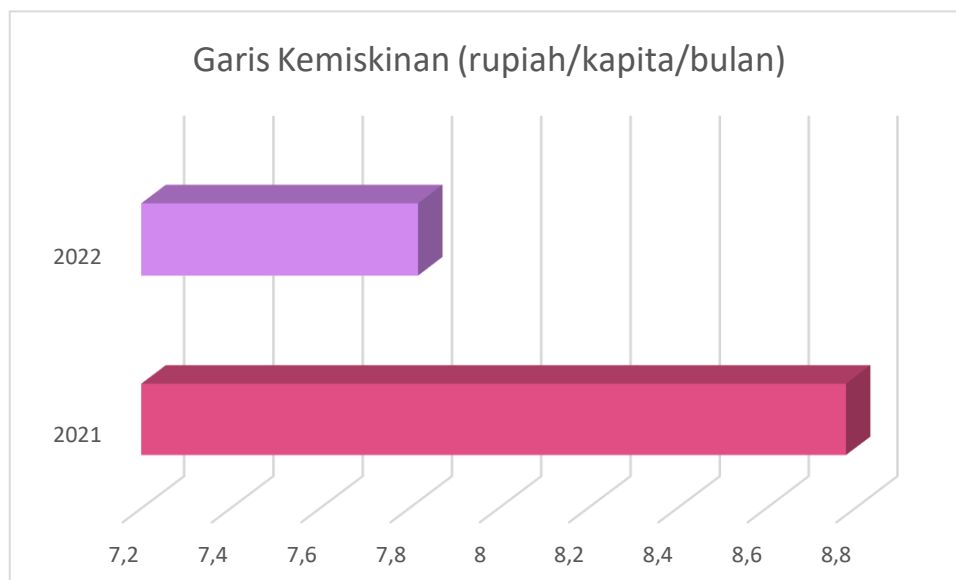
Grafik 4. 4 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022

Menurut grafik diatas tingkat kemiskinan di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan dari 17,37% ribu jiwa menjadi 16,34 ribu jiwa%, artinya angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi turun 1,03% ribu jiwa. Pemerintah Kota Tebing Tinggi meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta menjaga pertumbuhan UMKM. Pemerintah Kota Tebing Tinggi berharap dengan bantuan sosial yang telah dan sedang disalurkan saat ini kepada warga penerima juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batasan kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi suatu negara. Berikut merupakan garis kemiskinan

(rupiah/kapita/bulan) menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2021-2022:



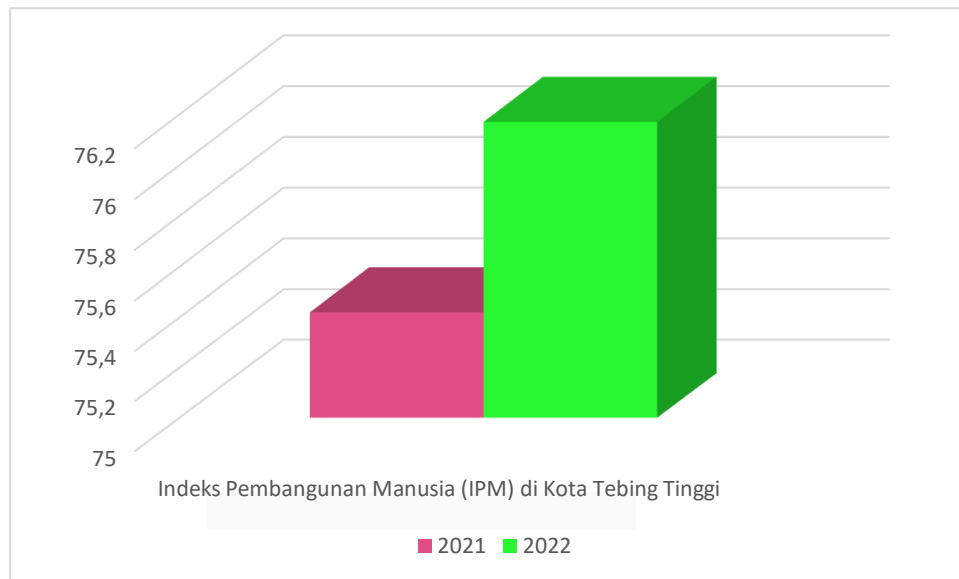
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Grafik 4. 5 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) di Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022

Garis kemiskinan di Kota Tebing Tinggi tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dimana pada tahun 2022 garis kemiskinan sebesar 8,78% ribu per kapita perbulan dan pada tahun 2022 sebesar 7,82% ribu perkapita perbulan.

B. Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Berikut dibawah ini perkembangan IPM yang ada di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut.



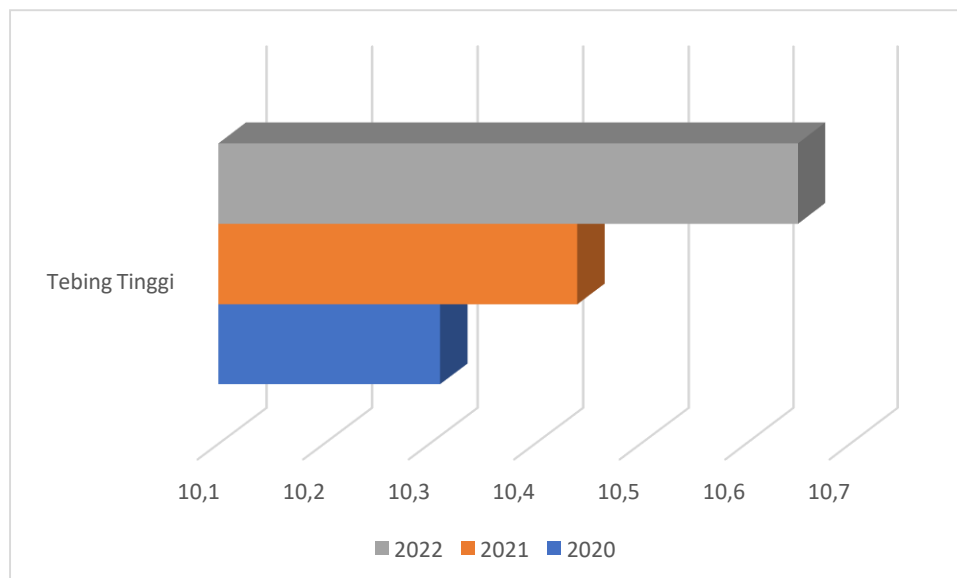
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi

Grafik 4. 6 Persentase IPM di Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Pada Kota Tebing Tinggi menunjukkan kenaikan IPM selama tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 persentase IPM sebesar 75,42% sedangkan pada tahun 2022 IPM di Kota Tebing Tinggi sebesar 76,17%.

C. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Adapun rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun di Kota tebing Tinggi tahun 2020-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Grafik 4. 7 Rata-rata lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun di Kota tebing Tinggi tahun 2020-2022

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 15 tahun di Kota Tebing Tinggi pada grafik diatas dapat dilihat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 RLS mencapai 10,31 tahun atau setara dengan SMA kelas 1 kemudian pada tahun 2021 mencapai 10,44 tahun atau setara dengan SMA kelas 1 dan pada tahun 2022 mencapai 10,65 atau setara dengan SMA kelas 1. Hal ini tentunya jauh dari batas minimum RLS untuk suatu daerah yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu 15 tahun atau setara jenjang diploma dan/atau universitas.

4.2 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian

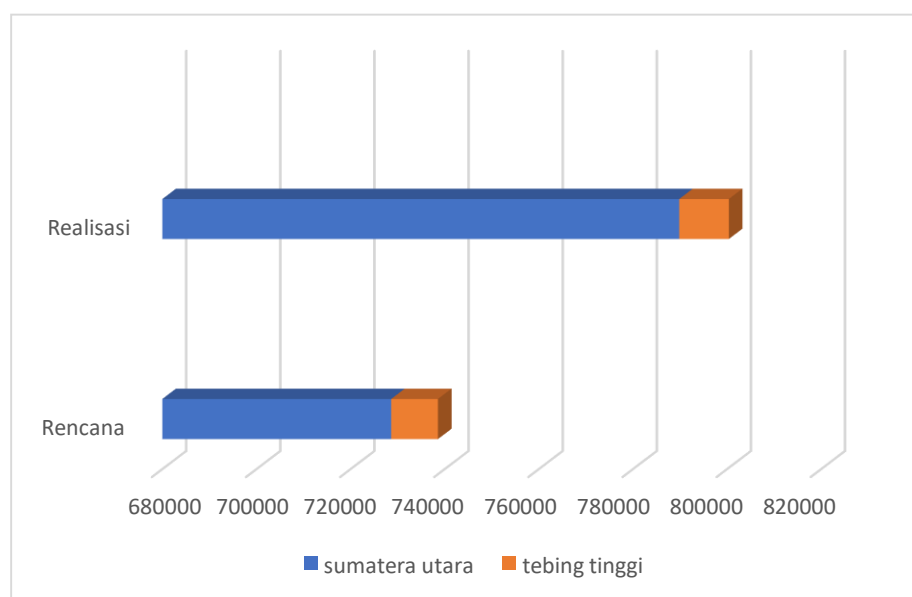
4.2.1 Perkembangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk kurangnya akses, pendapatan, pengeluaran subsisten, kerentanan penyakit, hutang dan piutang serta dalam beberapa kasus tertentu orang menjual barang-barang berharga mereka untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Putri

dkk, 2021: 33). Kemiskinan merupakan sebuah masalah utama yang sulit untuk diberantas dan memerlukan penanganan khusus agar dapat ditangani dengan baik, serta menjadi urusan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur meningkat menjadi 11,4% pada Maret 2021. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini sendiri, perlu dilakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menekan angka kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan pemerintah menciptakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut diharapkan dapat menangani kemiskinan ini dan tidak ada kesenjangan di masyarakat. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah menetapkan sebuah program bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, selaku instansi Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang sosial.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan atau siapa saja yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018. Program keluarga harapan dalam buku pedoman pelaksanaan PKH Kemensos RI (2019:9) merupakan (pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat harus

bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang terkait untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia). Program keluarga harapan terkhusus membantu dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program keluarga harapan yaitu RTSM memiliki anak ataupun anggota keluarga berusia 0 – 18 tahun, ibu hamil, disabilitas dan lanjut usia (Lansia). Adanya program keluarga harapan diharapkan masyarakat penerima bantuan memiliki akses yang baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu pada fasilitas kesehatan, pendidikan, kesenjangan sosial, keterasingan sosial, serta ketidakberdayaan masyarakat.

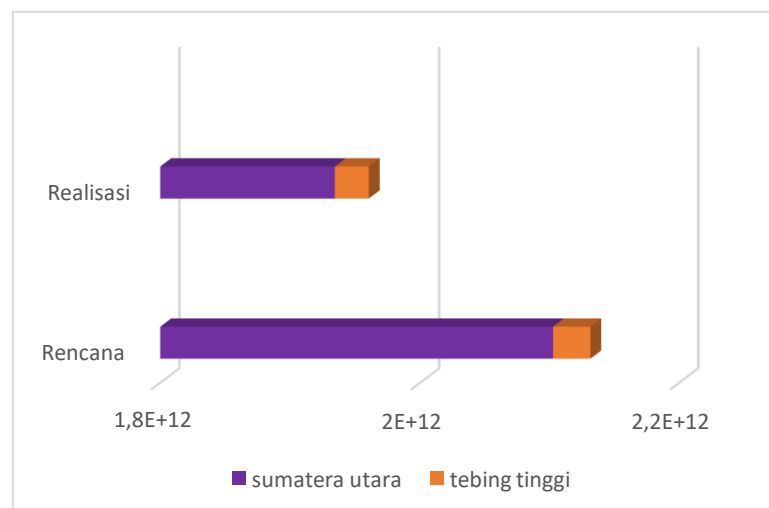


Sumber: Kementerian Sosial

Grafik 4. 8 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021

Pada data diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara yang terealisasi sebanyak 789.834 penerima sedangkan pada Kota Tebing Tinggi jumlah keluarga penerima manfaat yang terealisasi sebanyak 10.548 penerima. Terjadinya perbedaan antar jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terencana dan yang terealisa ini adalah salah satu jalan untuk mengentaskan keluarga Pra-Sejahtera menjadi tercukupi.

Bantuan yang diberikan pemerintah dari aspek perencanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat miskin atau KPM itu sendiri, sehingga kebutuhan yang di dapatkan KPM berupa uang tunai tersebut dapat di jadikan acuan dan melihat sejauh mana keberhasilan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumatera Utara dan Tebing Tinggi, maka anggaran yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan Kementerian Sosial sebagai berikut.



Sumber: Kementerian Sosial

Grafik 4. 9 Jumlah Anggaran (rupiah) di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021

Pada data diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara yang terealisasi sebanyak 789.834 penerima dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar 1,9 triliun sedangkan pada Kota Tebing Tinggi jumlah keluarga penerima manfaat yang terealisasi sebanyak 10.548 penerima dengan jumlah anggaran yang terelaborasi sebesar 26 milyar. Terjadinya perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang terelaborasi dikarenakan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Proses pendataan seperti penerima yang

sudah wafat tetapi masih termasuk kedalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih adanya penerima bantuan sosial yang tidak termasuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun menerima bantuan tersebut, kemudian penerima yang sudah dinonaktifkan tapi masih di berikan bantuan sosial, dan ada juga penerima yang menerima bantuan sosial lebih dari sekali atau ganda. Dengan demikian, banyak dana yang keluar secara berlebihan tidak sesuai dengan anggaran yang ditargetkan.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dibawah pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada awal kebijakan program keluarga harapan bergerak masih sangat lamban karena wilayah penerima yang terbatas. Pada tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K) di kantor wakil presiden mulai mengajukan perluasan wilayah PKH, agar penyelenggaraan program lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat miskin. Tahun 2011 program keluarga harapan di kembangkan di 25 Provinsi, dan pada awal 2012 dikembangkan lagi dan sudah mencapai di 33 Provinsi. Pelaksana program keluarga harapan dibentuk pada setiap Kecamatan yang terdapat peserta PKH. Pelaksana PKH terdiri dari pendamping sosial PKH, pendamping PKH akses, asisten pendamping, dan asisten pendamping PKH akses.

4.2.2 Evaluasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tahun 2023

Adapun jumlah sampel yang diambil menggunakan metode slovan yaitu jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu. Hal tersebut didasari dengan banyaknya jumlah penduduk di dua Kecamatan tersebut. Pada Kota Tebing Tinggi jumlah penduduk terbanyak urutan pertama yaitu Kecamatan Bajenis kemudian Kecamatan Rambutan. Sedangkan di urutan ketiga dan keempat yaitu Kecamatan Padang

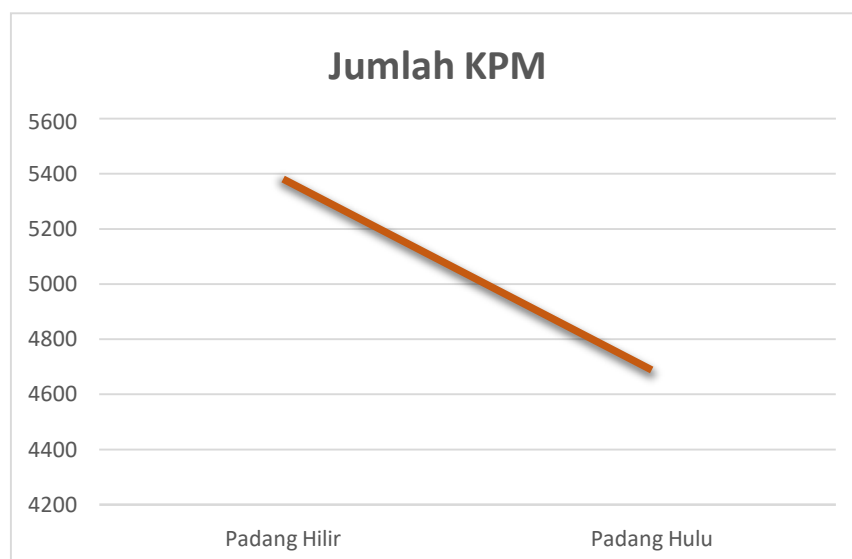
Hilir dan Kecamatan Padang Hulu. Penelitian sebelumnya sudah memakai lokasi untuk di dua kecamatan teratas, untuk itu saya melakukan penelitian dengan lokasi yang berbeda namun tetap pada dasar yang sudah dijelaskan.

Pelaksana PKH merupakan sekelompok orang yang bekerja dalam melaksanakan program, agar program PKH berjalan dengan baik dan lancar. Pendamping PKH bertanggung jawab kepada pelaksana PKH ditingkat Kab/Kota dan berkoordinasi dengan Camat setempat. Tugas dan tanggung jawab oleh pendamping PKH yaitu melaksanakan pendampingan kepada RTSM peserta PKH. Wilayah kerja pendamping PKH meliputi seluruh desa/kelurahan di satu wilayah kerja di setiap kecamatan. Jika di Kecamatan pendamping PKH lebih dari satu orang maka salah satu pendamping wajib ditunjuk sebagai Koordinator pendamping tingkat Kecamatan. Standard dan sasaran kebijakan program keluarga harapan adalah bantuan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah yang berupa uang tunai melalui rekening buku tabungan kepada masyarakat miskin dengan kriteria ibu hamil dan menyusui, balita, anak sekolah, disabilitas, dan lanjut usia (lansia), kemudian tujuan dari program keluarga harapan ini sangat banyak membantu perekonomian Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan membuat perilakunya agar lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan taraf pendidikan anak – anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Masyarakat penerima bantuan tujuan dari program keluarga harapan ini sangat membantu terutama untuk biaya pendidikan dan untuk memenuhi perlengkapan sekolah anak – anak mereka, serta meningkatkan akses kesehatan serta untuk kebutuhan pokok dan kesejahteraan bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuansosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. kriteria KPM PKH dari segi komponen komponen pendidikan dari keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah dari usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Jadi penerima bantuan

akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya yaitu bagi anak usia sekolah harus memenuhi kehadiran minimal 85% kehadiran dikelas. Keluarga Penerima Manfaat telah mengalami perubahan kearah yang lebih baik terutama pada bidang ekonomi, dan juga pendidikan.

Setelah disahkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018, maka Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersebar luas disetiap Kabupaten maupun Kota di Sumatera Utara, salah satunya yaitu Kota tebing tinggi dengan Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu. PKH memiliki beberapa komponen yaitu komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang tereliasasikan untuk kedua Kecamatan tersebut sebagai berikut.



Sumber: Dinas Sosial Tebing Tinggi

Grafik 4. 10 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu Tahun 2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat di masing-masing kecamatan yaitu di kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu pada tahun 2022. Jika dilihat kembali

maka terdapat perbandingan antara kedua kecamatan tersebut. Jumlah keluarga penerima manfaat di Kecamatan Padang Hilir lebih besar dari pada di Kecamatan Padang Hulu yaitu sebesar 5.381 penerima sedangkan di Kecamatan Padang Hulu sebesar 4.688 penerima. Adapun dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang tereliasasikan untuk kedua Kecamatan tersebut sebagai berikut.



Sumber: Dinas Sosial Tebing Tinggi

Grafik 4. 11 Jumlah Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu Tahun 2022

Pada grafik tersebut dapat terlihat bahwa dana yang terealisasi paling banyak pada tahun 2022 terdapat pada Kecamatan Padang Hilir sebesar 4.146.800.000 Milyar Rupiah sedangkan untuk Kecamatan Padang Hulu sebesar 3.592.975.000 Milyar Rupiah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Serta mengubah kelompok yang paling miskin, dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam

kehidupan sehari-hari serta mampu meningkatkan kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi terhadap pengeluaran rumah tangga. Seperti yang kita ketahui banyak masyarakat miskin atau penerima bantuan masih banyak yang mengeluh kesulitan ekonomi padahal pemerintah sudah melakukan upaya dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Namun dana atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat banyak yang sudah menyalahgunakan dengan membeli barang yang tidak dibutuhkan sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang mengikuti kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu dikarenakan beberapa yang tidak memiliki penghasilan yang cukup ataupun beberapa usaha yang mereka punya tidak cukup untuk membantu perekonomian mereka terutama untuk biaya kebutuhan sekolah dan akhirnya mereka mendapatkan saran dari Kepala Desa masing-masing untuk mengikuti atau mendaftar sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, namun ada juga masyarakat yang mampu justru mendapatkan bantuan PKH, hal ini menunjukkan bahwa data-data yang disusun oleh petugas PKH dan petugas PKH lebih mengutamakan keluarganya sendiri dibandingkan masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

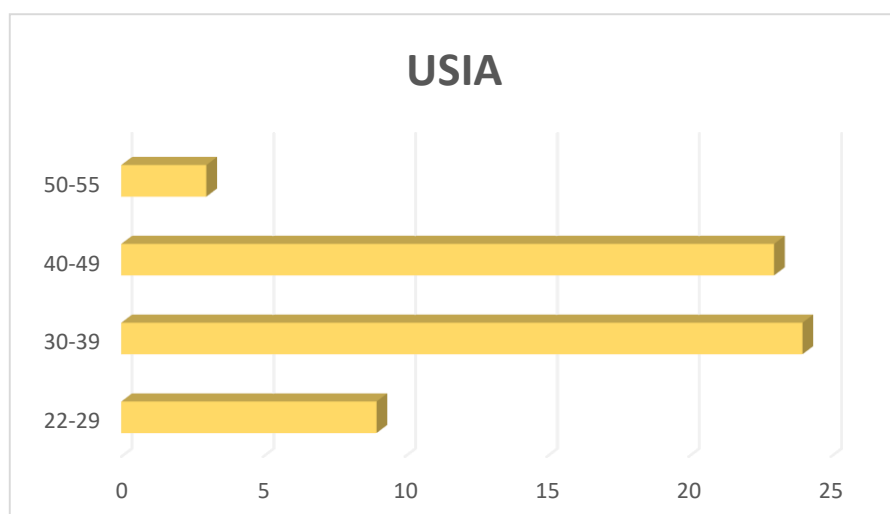
C. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu. Jumlah sampel penelitian sebanyak 99 penerima dan pendamping

Program keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan yang tersebar di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Pengambilan sampel dilakukan dengan membagikan kuesioner secara daring melalui *Google Form* serta menyebarkan secara langsung kuesioner yang telah dibuat kepada penerima dan pendamping Program keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Karakteristik umum sampel pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan/bulan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan.

a. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan

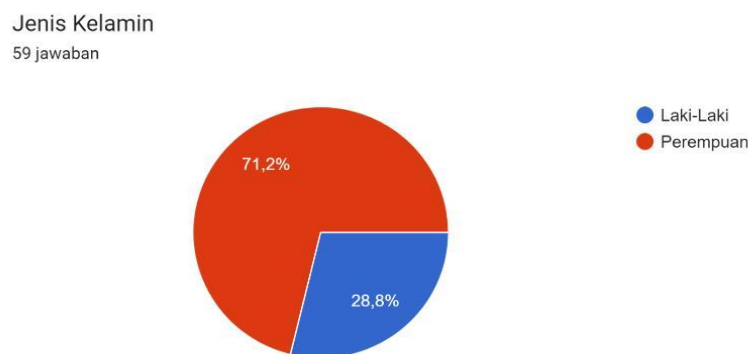
• **Usia dan Jenis Kelamin**



Grafik 4. 12 Usia Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

Dari data diatas dapat dilihat bahwa usia Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan 59 responden jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan terbanyak adalah usia 30-39 tahun yaitu 24 orang, dengan jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan paling sedikit adalah usia 50-55 tahun ada 3 orang. Kemudian untuk usia 22-29 tahun ada 11 orang dan usia 40-49 tahun ada 23 orang.

Mengapa usia 30-39 yang paling banyak mendapatkan PKH, karena memang di kedua kecamatan tersebut lebih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang usianya tidak terlalu tua karena rata-rata masih memiliki anggota keluarga yang masih sekolah, sehingga kepala keluarga yang diteliti pun lebih banyak usia tidak terlalu tua dibanding usia tua. Demikianlah peneliti menemukan sample usia Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu.

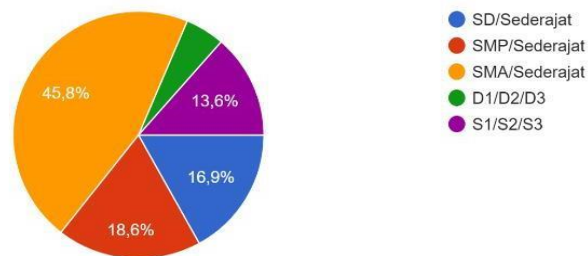


Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 71,2% dan yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 28,8%. Hal ini dikarenakan biasanya selain pandai dalam mengatur keuangan, yang berhak menerima PKH adalah kepala keluarga yang perempuan. Tetapi jika perempuan dewasa tidak ada lagi dalam keluarga, kepala keluarga laki-laki berhak menerimanya.

- **Pendidikan Terakhir Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**

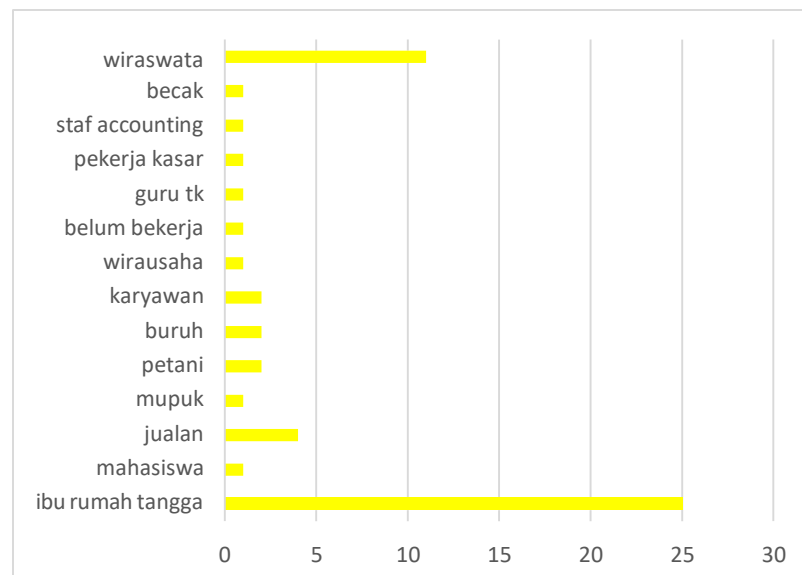
Pendidikan Terakhir
59 jawaban



Gambar 4. 2 Pendidikan Terakhir Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

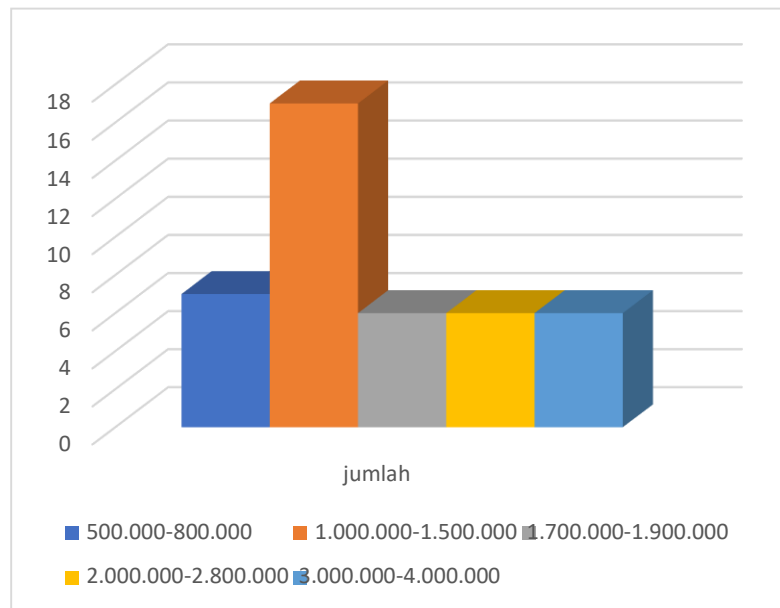
Dari data diatas dapat dilihat dari 59 Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA berjumlah 45,8% atau 27 kepala keluarga, sedangkan yang tamat SMP ada 18,6% atau 11 orang, dan yang SD sebesar 16,9% atau 10. Rata-rata masyarakat penerima PKH di Kec.Padang Hilir dan Padang Hulu ini tingkat pendidikannya cukup tinggi namun masih ada beberapa kepala keluarga penerima PKH yang tidak menempuh pendidikan otomatis tidak bisa baca tulis, para pendamping PKH inilah yang memberikan mereka arahan agar tetap memberikan semangat dan arahan kepada para ibu-ibu ini agar anak-anak mereka tidak mengalami hal serupa dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan.

- **Pekerjaan dan Pendapatan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**



Grafik 4. 13 Pekerjaan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

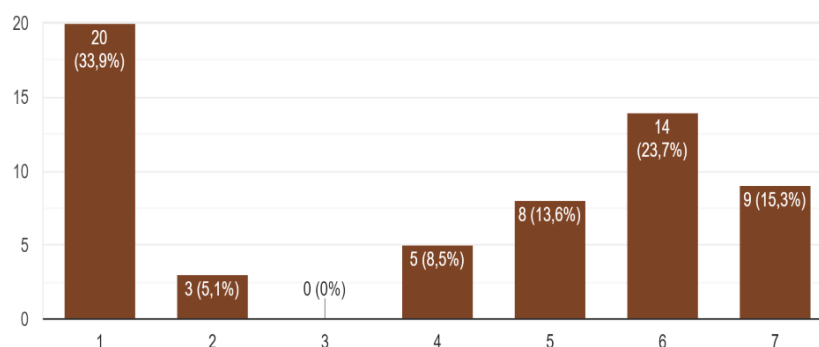
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik pekerjaan responden, mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 25 orang dan pada pekerjaan jualan sebanyak 4 orang dan sisanya dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 11 orang.



Grafik 4. 14 Pendapatan/bulan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

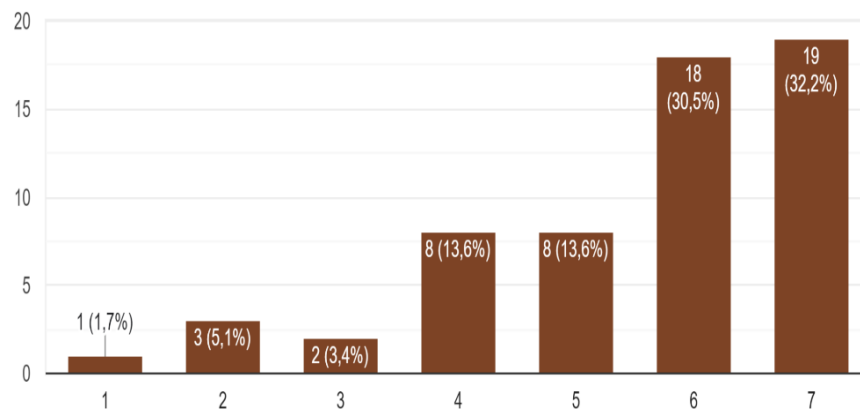
Dari data diatas dapat dilihat dari 59 Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan memiliki pekerjaan terbanyak sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 25 penerima dan rata-rata mempunyai pendapatan/bulannya yaitu sebesar Rp.1.000.000-Rp1.500.000.

D. Pernyataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan kecamatan Padang Hulu, kota Tebing Tinggi



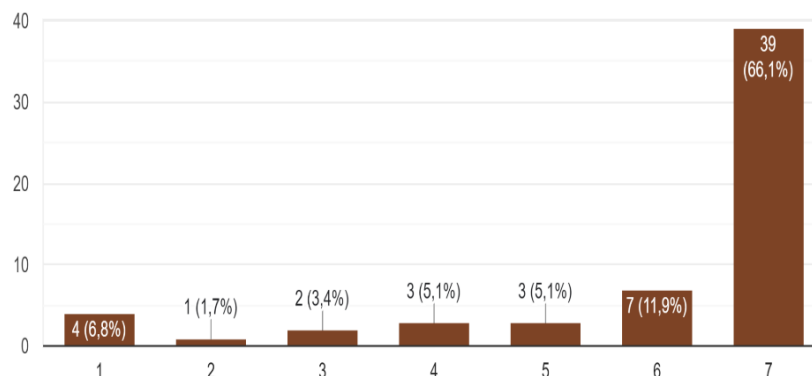
Gambar 4. 3 Mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melalui orang lain

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 20 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka mengetahui PKH tersebut tidak melalui orang lain. Beberapa calon penerima tersebut secara langsung mendatangi kantor kepala desa di masing-masing kecamatan untuk mendapat informasi tentang pendaftaran menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Setelah itu para calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan akan melengkapi berkas atau persyaratan yang diberi oleh kepala desa di masing-masing Kecamatan. Saat ini juga perkembangan teknologi sudah semakin maju, sehingga informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan mudah di lihat dalam *website-website* tertentu. Setelah itu para calon penerima dengan inisiatif untuk mencari segala sesuatu baik dalam persyaratan serta kelengkapan berkas lainnya melalui *website* tersebut.



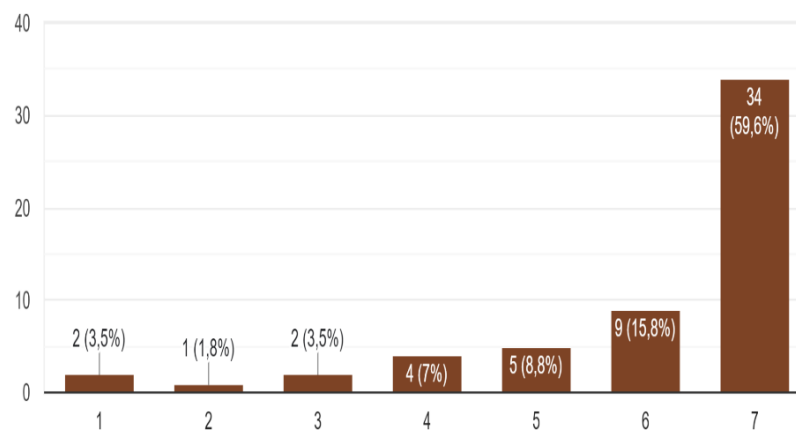
Gambar 4. 4 Penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta Program Keluarga harapan (PKH) komponen pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 19 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta Program Keluarga harapan (PKH) komponen pendidikan. Hal tersebut berarti setiap kepala desa memberikan informasi tentang PKH tersebut secara adil dan merata, sehingga masyarakat tidak ada yang merasa kekurangan informasi apapun. Menurut pendapat para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di dua kecamatan tersebut bahwa pemerintah desa atau pemerintah setempat sudah cukup terbuka dalam memberi informasi tentang PKH tersebut.



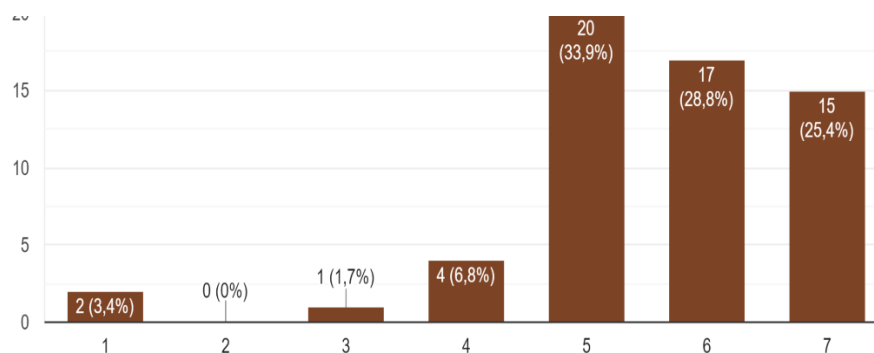
Gambar 4. 5 Menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan secara langsung melalui ATM

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 39 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara langsung melalui ATM penerima masing-masing dan tidak ada perantara lainnya yang berarti dana yang diberikan jatuh secara langsung kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Hal tersebut terjadi karena para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan, tidak terlalu percaya jika dana yang disalurkan masuk ke ATM pendamping ataupun orang lain. Sehingga para penerima PKH tersebut mengantiipasi agar hal-hal yang tidka diinginkan tidak terjadi.



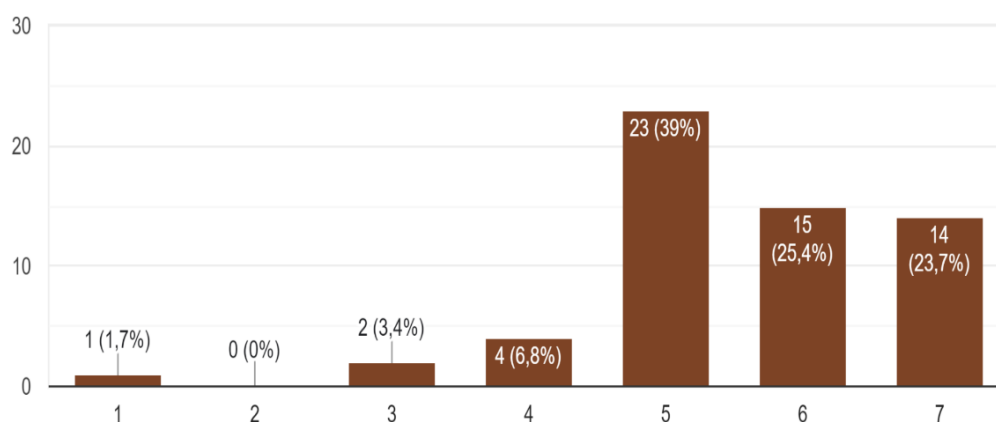
Gambar 4. 6 Proses pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan tepat pada waktu yang telah ditentukan (4 kali dalam 1 tahun)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 34 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan sesuai dengan ketentuan yaitu 4 kali dalam waktu 1 tahun. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu mengatakan untuk penyaluran dana PKH tersebut ditetapkan dalam kurun waktu per tiga bulan sekali selama 1 tahun. Pada tahap 1 dijadwalkan pada bulan Januari, Februari, hingga Maret, tahap 2 yaitu bulan April, Mei, Juni, tahap 3 yaitu bulan Juli, Agustus, September dan tahap 4 yaitu bulan Oktober, November, Desember. Sementara untuk tanggal yang pasti untuk pencarian dana PKH komponen pendidikan belum diketahui sepenuhnya pasalnya setiap daerah memiliki perbedaan jadwal, tergantung peraturan pemerintah masing-masing daerah. Oleh sebab itu, kalau ada penerima PKH yang belum menerima dana PKH pada bulan Januari bisa menunggu giliran pencairan di bulan Februari atau Maret.



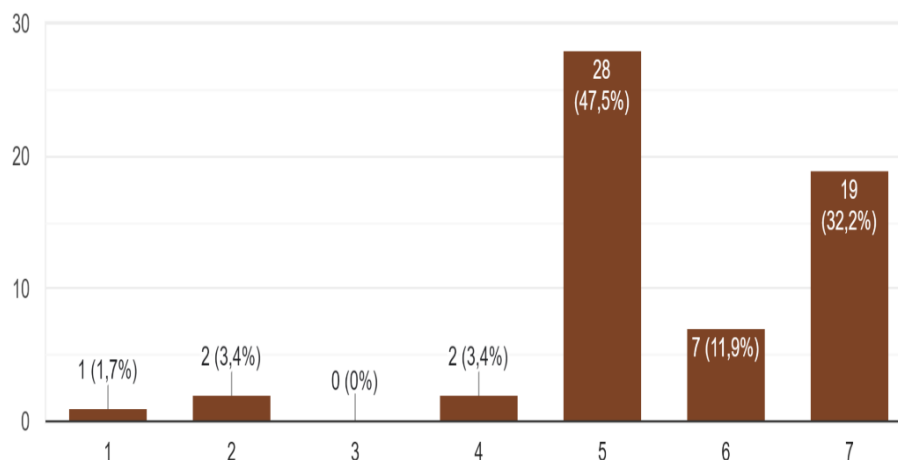
Gambar 4. 7 Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan benar-benar berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta Program keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 20 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka merasa dana PKH ini sudah cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta Program keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Setelah mendapat PKH ini diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus anak yang tidak dapat bersekolah dikarenakan kebutuhan sekolah tidak terpenuhi, sebab pemerintah telah memberikan bantuan maka dari itu kesadaran masyarakat dalam memerhatikan pendidikan sangat menentukan anaknya kelak dikemudian hari.



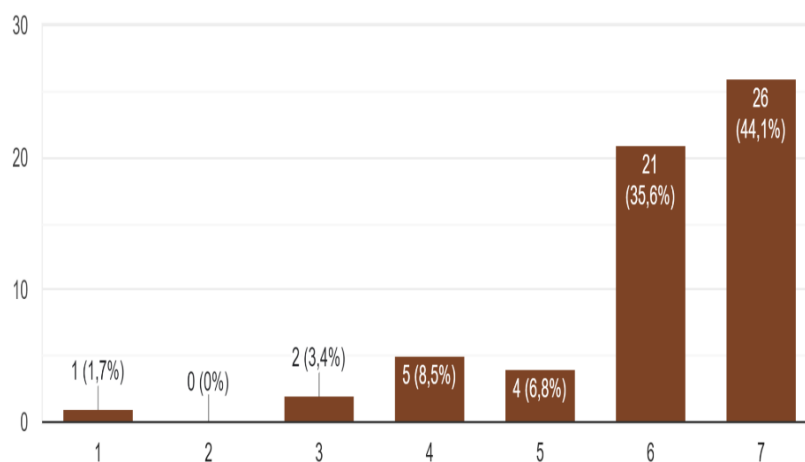
Gambar 4. 8 Bantuan dana yang diberikan dapat meningkatkan kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 23 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa bantuan dana yang diberikan pemerintah sangat berguna dalam meningkatkan kebutuhan pendidikan yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Masyarakat mengatakan setelah menerima dana tersebut, kebutuhan-kebutuhan sekolah anak mereka tidak ada yang kurang. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah dengan demikian jika tingkat pendidikan membaik dengan membaiknya juga kebutuhan untuk pendidikan, maka kesejahteraan sosial akan di dapat pada masyarakat tersebut.



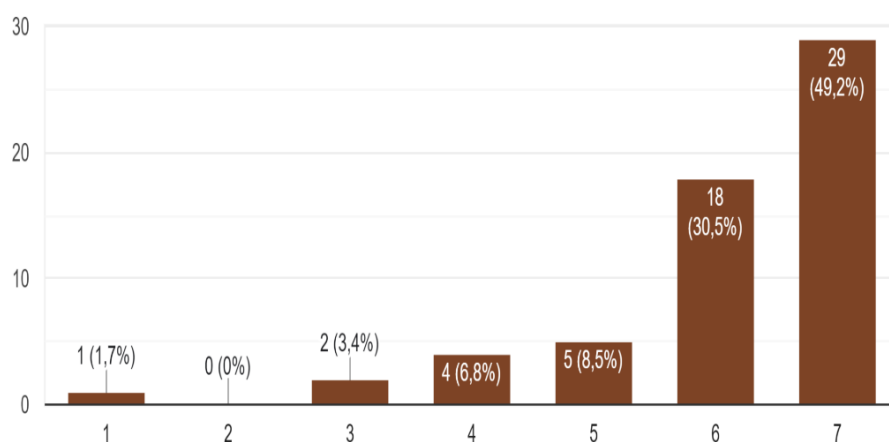
Gambar 4. 9 Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat menutupi dana pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 28 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa bantuan dana yang diberikan pemerintah selain untuk memenuhi kebutuhan sekolah juga dapat menutupi dana pendidikan. Tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Beberapa masyarakat ada yang mampu dalam mencukupi kebutuhan sekolah anaknya namun ada juga yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah anaknya, dengan demikian dana tersebut sangat berguna bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu.



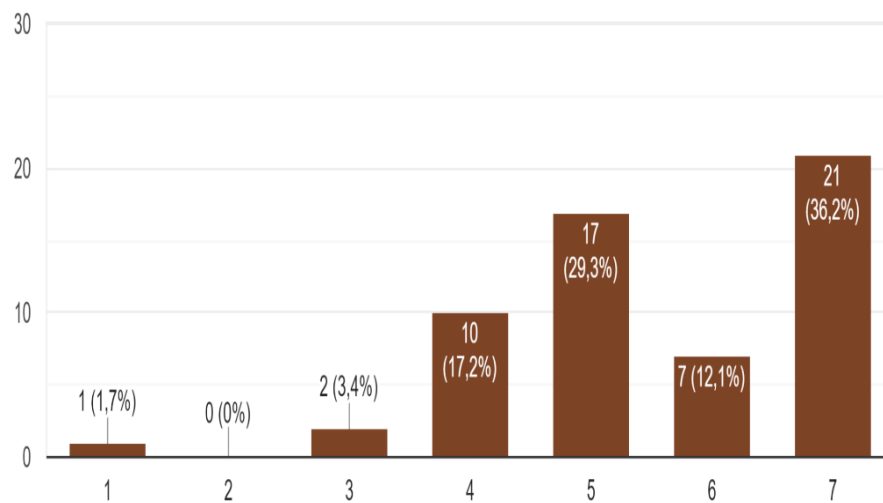
Gambar 4. 10 Memahami hak apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 26 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa masyarakat yang menerima PKH ini telah memahami hak apa saja yang harus mereka lakukan sebagai peserta yaitu seperti bantuan tunai yang diberikan kepada peserta setiap 3 bulan melalui kantor pos terdekat, untuk tahap pertama bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika peserta PKH (yaitu Ibu) telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinasikan oleh kKecamatan setempat dan anak-anak dari keluarga peserta PKH tersebut harus sudah terdaftar di satuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan pada tahap selanjutnya bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dari keluarga peserta PKH memenuhi komponen pendidikan yang ditetapkan (kehadiran di kelas/kelompok belajar) bukti bahwa anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan tersebut harus diverifikasi oleh tenaga pendidik.



Gambar 4. 11 Memahami kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 29 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa setelah mengetahui hak apa saja yang diterapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian mereka juga sudah mengetahui kewajibannya sebagai peserta PKH yaitu penerima PKH harus mendaftarkan anak tersebut di sekolah SD,SMP,dan SMA. Jika sudah terdaftar di satuan pendidikan, maka anak tersebut harus mengikuti kehadiran minimal 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Jumlah maksimal ketidakhadiran anak di sekolah yang diperbolehkan adalah 3 hari dalam 1 bulan, kecuali dikarenakan sakit maka diwajibkan memberikan surat keterangan sakit oleh dokter atau petugas kesehatan.

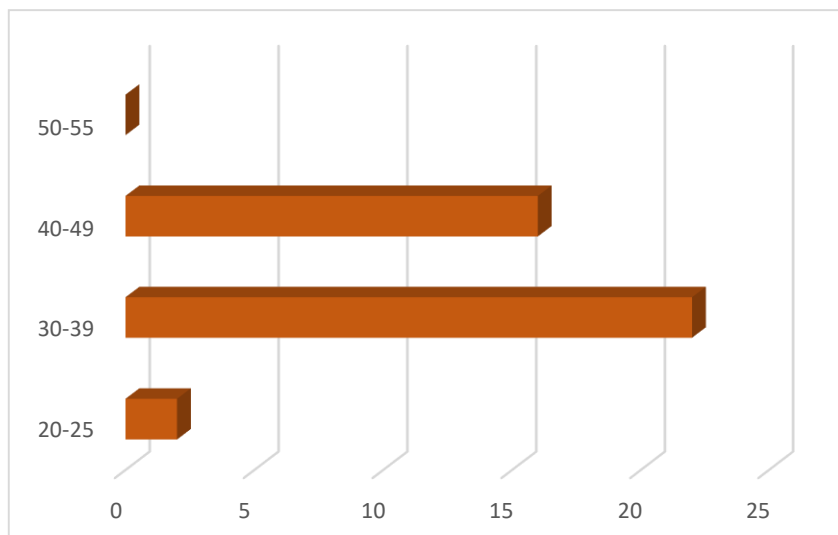


Gambar 4. 12 Tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap pendidikan berhasil dilakukan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 59 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 21 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan ini telah berhasil dilakukan. Sebagaimana diketahui tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

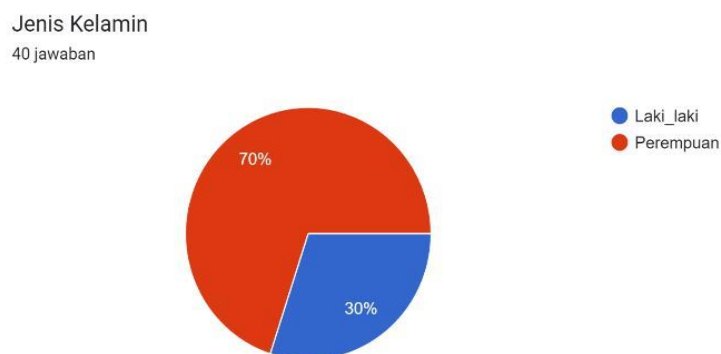
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan

- **Usia dan Jenis Kelamin**



Grafik 4. 15 Usia Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

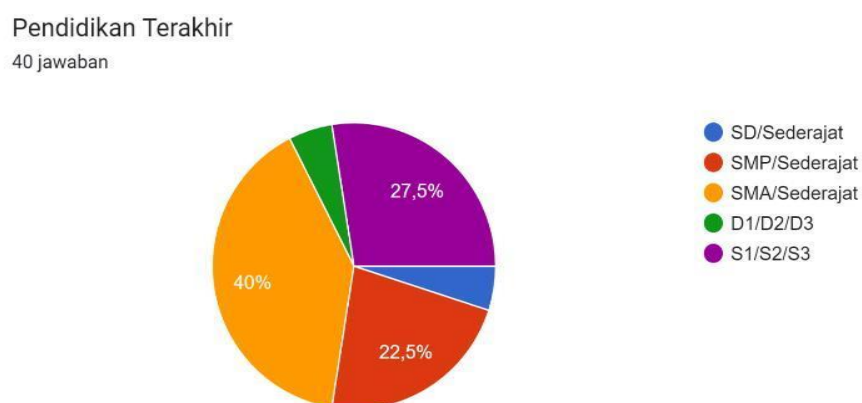
Dari data diatas dapat dilihat bahwa usia Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan 40 responden jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan terbanyak adalah usia 30-39 tahun yaitu 22 orang, dengan jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan paling sedikit adalah usia 50-55. Kemudian untuk usia 20-25 tahun ada 2 orang dan usia 40-49 tahun ada 16 orang.



Grafik 4. 16 Jenis Kelamin Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

Dari gambar di atas dan hasil penyebaran kusioner menunjukkan bahwasanya dari 40 responden pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec. Padang Hilir dan Kec. Padang Hulu yang mendominasi paling banyak yaitu berusia 30-39 tahun sebanyak 22 responden yang usianya tidak terlalu tua serta didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 70%.

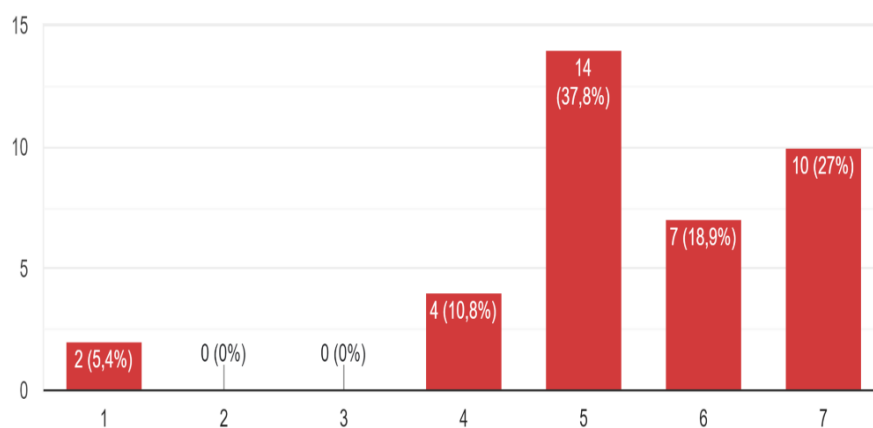
- **Pendidikan Terakhir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**



Grafik 4. 17 Pendidikan Terakhir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu

Dari data diatas dapat dilihat dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA berjumlah 40% atau 16 pendamping, sedangkan yang tamat S1 ada 27,5% atau 11 pendamping. Rata-rata pendamping PKH di Kec.Padang Hilir dan Padang Hulu ini tingkat pendidikannya cukup tinggi sehingga akan memudahkan mereka selaku pendamping dalam menyampaikan informasi penting terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan ini. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan.

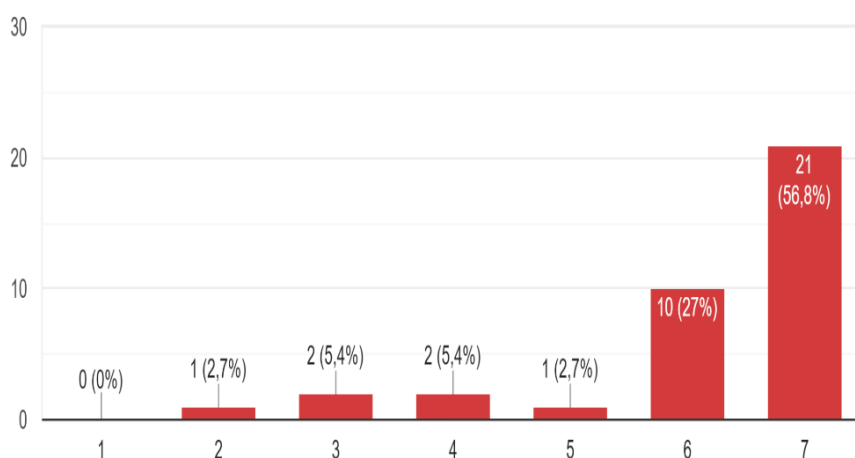
E. Pernyataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan di Kecamatan Padang Hilir dan kecamatan Padang Hulu, kota Tebing Tinggi



Gambar 4. 13 Menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan kurang lebih 5 tahun

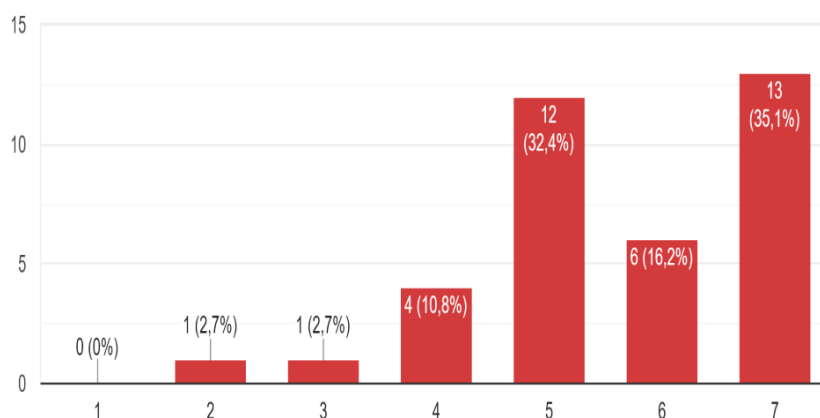
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 14 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa tidak semuanya para pendamping PKH komponen pendidikan ini berpengalaman lebih kurang dari 5 tahun, ada para pendamping yg baru 2 tahun ini menjadi pendamping dan ada

juga yang baru 1 tahun menjadi pendamping. Tetapi jika para pendamping PKH komponen pendidikan ini telah menjadi pendamping kurang lebih 5 tahun makan tidak dikhawatirkan lagi untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada para penerima ataupun peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Para pendamping juga menyatakan bahwa mereka walaupun belum lama menjadi pendamping tetapi mereka tetap melakukan tugas dan kewajiban mereka secara profesional dan yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.



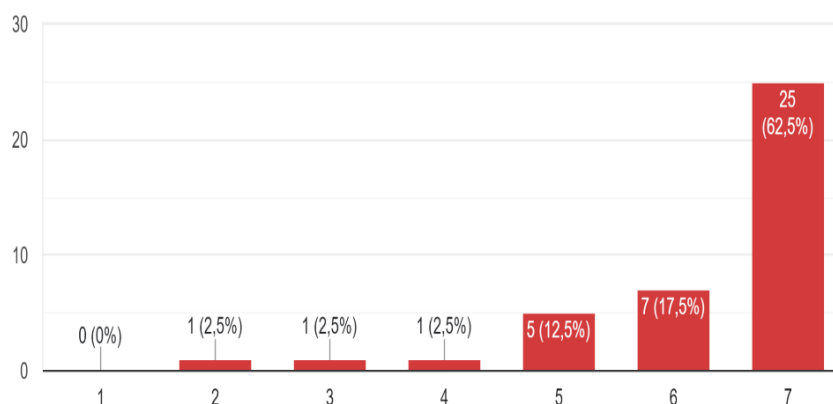
Gambar 4. 14 Pendamping menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara langsung dan membagikannya dengan anggota

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 21 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka mendapatkan dana PKH tersebut kemudian membagikannya ke penerima PKH tersebut. Terkadang para pendamping mendapatkan sedikit dana untuk ucapan terimakasih dari penerima namun mereka menegaskan dana tersebut bukanlah dana yang dipotong untuk dana pendamping melainkan ucapan terimakasih atau inisiatif tersendiri dari para penerima.



Gambar 4. 15 Para pendamping aktif melakukan pertemuan dengan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

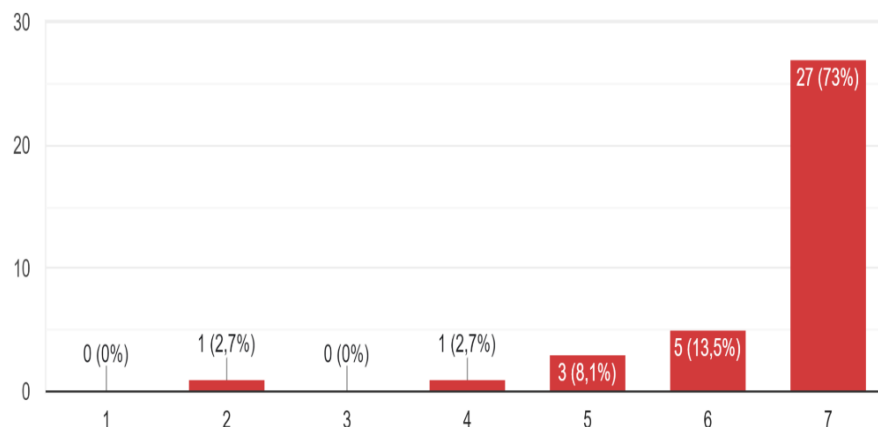
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 13 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka selalu aktif melakukan pertemuan dengan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan, berdasarkan hasil wawancara, beberapa pendamping selalu melakukan pertemuan pada setiap proses pencairan dana PKH tersebut. Dalam pertemuan tersebut disitulah para pendamping akan menyampaikan kembali atau mengingatkan kembali hal apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan.



Gambar 4. 16 Para pendamping selalu bersedia mendengar aduan dari para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan dan memberikan pengarahan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program

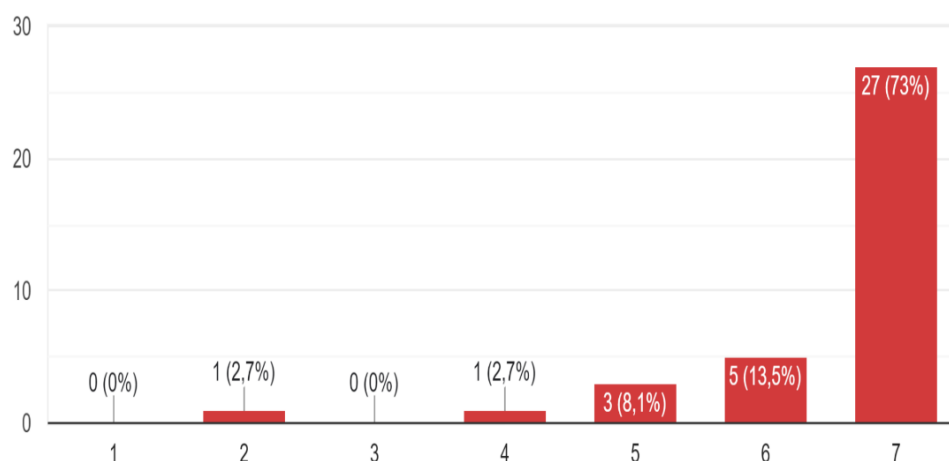
Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 25 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang mengeluh atau mengadu kepada pendamping tentang dana PKH yang terlambat dikirimkan. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat juga mengadu ada yang tidak tepat sasaran dana tersebut diberikan kepada orang yang memang memiliki keuangan yang cukup, untuk itu para pendamping mengatakan mereka selalu mendengar aduan dari masyarakat dan dengan cara yang baik pula para pendamping memberikan arahnya kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu. Arahan yang diberikan oleh pendamping tersebut, dapat diterima oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan.



Gambar 4. 17 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik

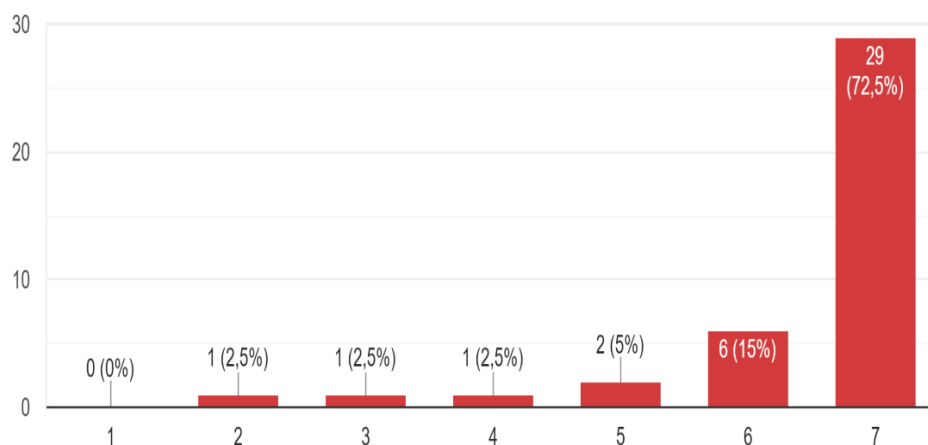
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 27 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka selaku pendamping sudah melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun tugas dari pendamping

PKH komponen pendidikan ini yaitu, melakukan sosialisasi PKH kepada pihak pemerintahan kecamatan, kepada UPTD pendidikan dan masyarakat umum. Kemudian pendamping menyelenggarakan pertemuan awal kepada seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan, dan selalu melakukan kegiatan sosialisasi dan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan.



Gambar 4. 18 Pendamping memperlakukan seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara sama

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 27 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka selaku pendamping memperlakukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara adil atau secara sama. Dalam hal ini mereka mengatakan mereka tidak ada memperlakukan salah satu peserta PKH secara berlebihan untuk memanfaatkan peserta, meskipun mungkin ada beberapa pendamping yang melakukan hal tersebut namun dari hasil wawancara hanya sedikit yang melakukan hal yang tidak semestinya.



Gambar 4. 19 Pendamping memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 40 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan terdapat sebanyak 29 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan di Kec.Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu menyatakan bahwa mereka selaku pendamping selalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) seperti pada saat menyiapkan berkas untuk mendaftar, pendamping selalu memberitahu apa saja berkas yang kurang lengkap untuk segera melengkapinya serta jika melakukan pendaftaran online para pendamping bersedia membantu mendaftarkannya dan pada proses validasi jika ada masalah yang terjadi pendamping juga selalu bersedia membantu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Perkembangan penerima bantuan PKH di Sumatera Utara dan Tebing Tinggi yaitu terdapat perbedaan antara jumlah KPM yang terencana dan terealisasi dan juga terdapat perbedaan antara jumlah anggaran yang terencana dan terealisasi. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Proses pendataan seperti penerima yang sudah wafat tetapi masih termasuk kedalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih adanya penerima bantuan sosial yang tidak termasuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun menerima bantuan tersebut, kemudian penerima yang sudah dinonaktifkan tapi masih di berikan bantuan sosial, dan ada juga penerima yang menerima bantuan sosial lebih dari sekali atau ganda. Dengan demikian, banyak dana yang keluar secara berlebihan tidak sesuai dengan anggaran yang ditargetkan.
2. Dilihat dari 99 responden yaitu 59 orang penerima PKH dan 40 orang pendamping di Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir terdapat 20 KPM menyatakan bahwa dana PKH sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan juga dapat menutupi dana pendidikan.

5.2 Saran

1. Bagi pendamping PKH sebaiknya lebih memperhatikan data-data masyarakat yang mengajukan bantuan PKH agar dana PKH ini dapat diberikan atau tepat sasaran kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan PKH.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2022. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020-2022. Sumatera Utara : BPS
<https://sumut.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). Kriteria Miskin <https://bps.go.id>
- Kementerian Sosial “Program Keluarga Harapan” www.kemsos.go.id
- Kuncoro, Mudrajad (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hariyati, S. (2018). Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96.
- Azhari, S. C., Mulyanie, E., & Saputri, S. I. (2022). Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT Melalui Program Pejuang Muda di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP)*, 5(1), 32-41.

- Febrianti, R. D. (2021). Pemanfaatan Bantuan PKH Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo. *Paradigma*, 10(1).
- Hariyati, S. (2018). *Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelan*. Skripsi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imsar, & Pratiwi, C. D (2022). Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 2205-2622.
- Jannah, N., Muda, I. & Jamil, B (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area). *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 1(1), 8-15.
- Lubis, M. T. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation).
- Pohan, M., Jufrizen, J., & Annisa, A. (2021, November). Pengaruh konsep diri, kelompok teman sebaya, gaya hidup terhadap perilaku konsumtif dimoderasi literasi keuangan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 402-419).

LAMPIRAN

KUSIONER PENELITIAN

- Penggunaan Skala Linkert Numerik:

Tidak Dilakukan

Dilakukan



A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : _____
- Usia : _____
- Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
- Pendidikan Terakhir : SD/ sederajat
 SMP/ sederajat
 SMA/ sederajat
 D1/ D2/ D3
 S1/ S2/ S3
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____
- Jumlah Pendapatan/bulan : _____

- **Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**

1. Mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melalui orang lain

Tidak Dilakukan

Dilakukan



2. Penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta Program Keluarga harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



3. Menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan secara langsung melalui ATM

Tidak Dilakukan

Dilakukan



4. Proses pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan tepat pada waktu yang telah ditentukan (4 kali dalam 1 tahun)

Tidak Dilakukan

Dilakukan



5. Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan benar-benar berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta Program keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



6. Bantuan dana yang diberikan dapat meningkatkan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



7. Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat menutupi dana pendidikan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



8. Memahami hak apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



9. Memahami kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan**Dilakukan**

10. Tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap pendidikan berhasil dilakukan

Tidak Dilakukan**Dilakukan**

• **Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**

1. Menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan kurang lebih 5 tahun

Tidak Dilakukan**Dilakukan**

2. Pendamping menerima dana Program Keluarga Harapam (PKH) komponen pendidikan secara langsung dan membagikannya dengan anggota

Tidak Dilakukan**Dilakukan**

3. Para pendamping aktif melakukan pertemuan dengan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan**Dilakukan**



4. Para pendamping selalu bersedia mendengar aduan dari para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan dan memberikan pengarahan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



5. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik

Tidak Dilakukan

Dilakukan



6. Pendamping memperlakukan seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara sama

Tidak Dilakukan

Dilakukan



7. Pendamping memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan

Tidak Dilakukan

Dilakukan



- **Jawaban Kuesioner Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**

Mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan melalui orang lain	Penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta Program Keluarga harapan (PKH) komponen pendidikan	Menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan secara langsung melalui ATM
7	5	7
6	6	7
7	6	7
1	2	1
2	2	4
1	3	4
6	6	7
4	5	2
6	6	7
7	6	7
6	6	7
1	4	3
7	6	7
1	4	4
5	4	6
4	4	5
6	6	7
6	6	7
7	4	7
1	2	3
4	5	7
5	6	7
1	1	1
1	6	7
1	3	1
1	6	7
1	7	7
6	7	7

6	6	7
6	7	7
6	7	7
6	6	7
4	7	7
2	7	7
5	6	6
6	7	7
7	6	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
6	6	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	7	7
1	6	7
5	5	6
5	5	6
5	5	6
4	4	5
5	5	6
5	5	6
6	4	5
2	4	1

Proses pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan tepat pada waktu yang telah ditentukan (4 kali dalam 1 tahun)	Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan benar-benar berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	Bantuan dana yang diberikan dapat meningkatkan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan
7	5	5
7	4	5
7	5	5
2	4	4
4	5	4
4	5	6
7	6	5
3	4	5
7	5	5
7	5	5
7	5	5
3	3	3
6	5	5
4	4	5
4	5	7
5	6	6
7	5	5
6	5	5
7	7	7
5	5	6
6	6	6
7	5	5
1	1	1
7	7	6
1	1	3
7	6	6
5	6	6
7	5	4
7	5	5
7	5	5
7	6	5

7	6	5
7	5	5
7	5	5
6	6	5
7	6	5
7	5	5
7	6	7
7	6	6
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	7
7	7	6
7	6	6
6	6	5
5	5	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	4
6	7	6
5	6	6
7	7	7

Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dapat menutupi dana pendidikan	Memahami hak apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	Memahami kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	Tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap pendidikan berhasil dilakukan
5	6	6	6
5	6	6	4
5	6	6	4
2	4	3	3
5	4	5	5
2	6	5	5
5	6	6	5
5	3	4	4
5	6	6	5
5	6	6	5
5	6	6	5
5	4	4	4
5	6	6	5
5	6	4	4
4	4	6	7
7	5	4	4
5	7	7	4
5	6	6	5
7	7	7	7
7	7	7	7
6	5	6	6
5	6	6	5
1	1	1	1
5	5	7	
4	3	3	3
5	7	7	7
5	6	7	7
5	7	7	5
5	7	7	6
5	7	7	5

5	6	6	5
5	7	7	5
5	7	7	5
5	7	7	4
6	6	6	7
6	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	7
6	6	6	6
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	6
7	7	7	4
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	4
7	7	7	5
7	7	7	7
7	7	7	7
6	7	7	5
5	6	5	5
6	6	7	6
7	5	6	7
6	6	5	7
5	6	6	7
7	7	5	6
5	6	6	7
7	7	5	6
5	6	6	7
7	4	7	7

- **Jawaban Kuesioner Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Pendidikan**

Menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan kurang lebih 5 tahun	Pendamping menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan secara langsung dan membagikannya dengan anggota	Para pendamping aktif melakukan pertemuan dengan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan	Para pendamping selalu bersedia mendengar aduan dari para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Pendidikan dan memberikan pengarahan
1	2	2	2
7	7	7	5
7	7	7	6
7	7	7	7
5	6	6	6
1	3	4	3
4	3	4	6
5	6	7	5
6	4	6	7
6	6	5	5
5	4	5	6
6	6	4	6
4	6	5	7
5	6	6	7
5	6	5	5
5	6	5	7
5	5	5	4
5	7	7	7
6	7	7	7
6	7	7	7
5	7	5	7
5	7	5	6
6	7	5	7
6	7	6	5
7	7	7	7
4	6	5	6
7	6	7	7
7	7	7	7

7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	7	7
5	7	5	7
5	7	5	7
7	7	6	7
4	7	6	7
5	7	3	7
7	7	7	7
7	7	7	7
5	7	4	7

